



Katalog BPS.

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## 2007 - 2008



**Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2007-2008**

ISBN :  
Nomor Publikasi :  
Katalog :

Ukuran buku : 17.6 x 25 cm  
Jumlah halaman : x + 100 halaman

Naskah :  
Sub Direktorat Konsistensi Statistik

Diterbitkan oleh :  
Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :  
CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

<http://www.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai ukuran kinerja pembangunan, pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; sedangkan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap propinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan mengetahui peta pembangunan manusia di semua daerah, maka diharapkan setiap daerah termotivasi untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi berjudul “Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008” ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2009  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Rusman Heriawan

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan .....	5
1.4 Sumber Data .....	5
BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM .....	9
2.1 Pengertian IPM.....	9
2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	10
2.2.1 Angka Harapan Hidup .....	10
2.2.2 Tingkat Pendidikan .....	10
2.2.3 Standar Hidup Layak .....	11
2.3 Penyusunan Indeks .....	12
BAB III. HASIL-HASIL IPM .....	17
3.1 Perkembangan IPM .....	17
3.2 Perkembangan Komponen IPM .....	21
3.2.1 Angka Harapan Hidup .....	21
3.2.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.....	24
3.2.3 Daya Beli .....	30
BAB IV. DISPARITAS ANTAR WILAYAH .....	35
4.1 Capaian IPM Provinsi .....	35
4.1.1 Status Pembangunan Provinsi .....	41
4.2 Capaian IPM Kabupaten dan Kota .....	43
4.2.1 Status Pembangunan Kabupaten/Kota .....	45
4.3 Disparitas Pembangunan Manusia .....	45
BAB V. HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR	
SOSIAL EKONOMI.....	53
5.1 Hubungan IPM dengan Indikator Lain secara Bivariat.....	53
5.1.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan	
Pembangunan Manusia .....	53
5.1.2 Hubungan PDRB per Kapita dengan Pembangunan	
Manusia.....	58

## DAFTAR ISI

---

5.1.3 Hubungan Persentase Penduduk Miskin dengan Pembangunan Manusia.....	61
5.2 Keterkaitan IPM dengan variabel sosial ekonomi.....	64
5.2.1 Spesifikasi Model .....	64
5.2.2 Hasil Regresi dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia 2008.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	71
TIM PENULIS.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	75

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) .....	12
Tabel 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM.....	13
Tabel 3.1	Angka Harapan Hidup dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008.....	23
Tabel 3.2	Angka Melek Huruf dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008.....	26
Tabel 3.3	Rata-rata Lama Sekolah dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008.....	28
Tabel 3.4	Pengeluaran per kapita dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008.....	31
Tabel 4.1	Peringkat IPM menurut Provinsi.....	36
Tabel 4.2	Status Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Tahun 2007-2008.....	41
Tabel 4.3	Provinsi yang Mencatat Kemajuan Pesat Selama, Tahun 2007-2008.....	42
Tabel 4.4	Kabupaten dan Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah, Tahun 2007 dan 2008.....	43
Tabel 4.5	Sepuluh Kabupaten dan Kota yang Menghasilkan Reduksi <i>Shortfall</i> , Terbesar, Tahun 2007-2008.....	44
Tabel 4.6	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, Tahun 2008 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1	Diagram Penghitungan IPM .....	9
Gambar 3.1	Perkembangan IPM, Tahun 1996-2008 .....	18
Gambar 3.2	Perkembangan Reduksi <i>Shortfall</i> , Tahun 1996-2008 .....	19
Gambar 3.3	Perkembangan komponen IPM, 2007-2008 .....	20
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Harapan Hidup, 1996-2008.....	22
Gambar 3.5	Perkembangan Angka Melek Huruf 1996-2008...	25
Gambar 3.6	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, 1996-2008.....	27
Gambar 3.7	Perkembangan Daya Beli Masyarakat, Tahun 1999-2008.....	30
Gambar 4.1	Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2007-2008.....	37
Gambar 4.2	Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2007-2008.....	38
Gambar 4.3	Reduksi <i>Shortfall</i> untuk Provinsi dengan IPM Tertinggi, Tahun 2008 .....	38
Gambar 4.4	Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2008 .....	39
Gambar 4.5	Kisaran IPM Tingkat Provinsi Tahun 2008.....	40
Gambar 4.6	Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2008 .....	46
Gambar 4.7	Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur,2006..	48

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 5.1	Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Kapita (2005-2008) dan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM (2005-2008).....	55
Gambar 5.2	PDRB per Kapita 2007 (ribu Rupiah) dan IPM 2008.....	59
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Miskin 2008 dan IPM 2008.....	62
Gambar 5.4	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Provinsi, Tahun 2008 (Persen).....	66
Gambar 5.5	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2008 (Persen).....	66
Gambar 5.6	Rata-Rata Umur Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Provinsi Tahun 2008 (Persen).....	68
Gambar 5.7	Setengah Pengangguran dengan Jam Kerja Per Minggu < 15 jam Berdasarkan Provinsi, Tahun 2008 (Persen).....	68
Gambar 5.8	Persentase Desa yang Telah Menggunakan Listrik, Berdasarkan Provinsi, Tahun 2008 (Persen).....	69
Gambar 5.9	Persentase Desa dengan Jarak SMP Terdekat >10 km Berdasarkan Provinsi, Tahun 2008 (Persen).....	69



# PENDAHULUAN

1

<http://www.kips-go.id>

# PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, *Human Development Report* 2000). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf.

Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antar wilayah atau antar negara. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Wikipedia).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, *knowledge*/pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia. Seperti dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana dan kelaparan massal.

Secara umum, perkembangan IPM di Indonesia periode 2004-2008 terus mengalami peningkatan. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian negara. Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Saat ini pemerintah menunjukkan perhatian lebih terhadap isu pembangunan manusia. Secara berkala data IPM digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam penyusunan Dana Alokasi Umum/DAU, selain jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB per-kepita dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia (Aloysius, 2009). Menurut UNDP (*Human Development Report*, 1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan pemerintah. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan pada indikator sosial seperti pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai investasi untuk membangun manusia. Pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Dalam analisis IPM Indonesia tahun 2008, dicoba menganalisa hubungan IPM dengan indikator sosial ekonomi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat secara lebih detail kecenderungan pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia.

## PENDAHULUAN

---

### 1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis IPM selama tahun 2007-2008. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangan IPM juga digunakan data IPM pada tahun sebelumnya. Selain itu, publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM. Selanjutnya, akan diulas disparitas IPM antar wilayah.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan :

1. Menyajikan perkembangan IPM dan komponennya secara nasional.
2. Menyajikan analisis perkembangan IPM dan komponennya antar propinsi dan antar kabupaten/kota.
3. Menyajikan analisis keterkaitan IPM dengan indikator lainnya.

### 1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Kemudian Bab IV menguraikan disparitas IPM antar wilayah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Analisis keterkaitan IPM dengan indikator lainnya disajikan pada Bab V.

### 1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Sebagai penunjang digunakan data Supas, Proyeksi Penduduk (SP 2000) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan

Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*) dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi (lihat Tabel 2.1). Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

<http://www.bps.go.id>

**METODOLOGI  
PENGHITUNGAN  
IPM**

**2**

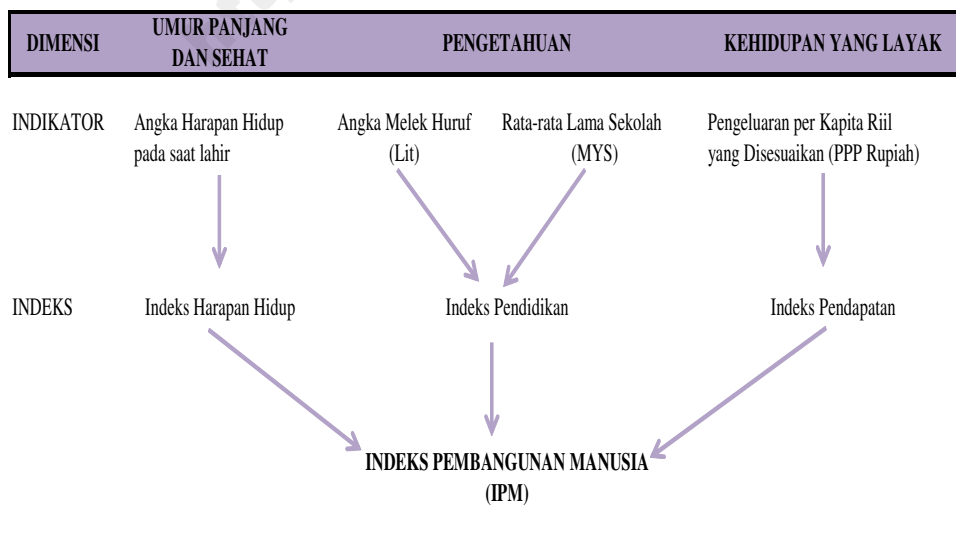
# METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

## 2.1 Pengertian IPM

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (Gambar 2.1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

**Gambar 2.1. Diagram Penghitungan IPM**



### 2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

#### 2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Melalui program *Mortpack*, dihasilkan estimasi angka harapan hidup 4 tahun sebelum tahun survey. Maka untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun survey dilakukan *fitting model* dari beberapa data *history*. Untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir tahun 2008, digunakan beberapa sumber data yaitu SP 2000, SUPAS 2005, Susenas 2006, dan Susenas 2007. Selanjutnya dilakukan *fitting model* untuk mendapatkan angka harapan hidup tahun 2008.

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

#### 2.2.2 Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah



## METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

---

masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

### 2.2.3 Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned} C(I) &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\ &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \end{aligned}$$

dan seterusnya.

dimana

$C_{(i)}$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita.

$Z$  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500,- per kapita per tahun atau Rp.1.500,- per kapita per hari.

## METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

**Tabel 2.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)**

Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)	Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
1. Beras Lokal	Kg	7,25	<b>lanjutan</b>		
2. Tepung terigu	Kg	0,10	15. Pepaya	Kg	0,18
3. Singkong	Kg	0,22	16. Kelapa	Butir	0,56
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50	17. Gula	Ons	1,61
5. Teri	Ons	0,32	18. Kopi	Ons	0,60
6. Daging sapi	Kg	0,78	19. Garam	Ons	0,15
7. Ayam	Kg	0,65	20. Merica	Ons	0,13
8. Telur	Butir	1,48	21. Mie instan	80 Gram	0,79
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48	22. Rokok kretek	10 batang	2,86
10. Bayam	Kg	0,30	23. Listrik	Kwh	2,06
11. Kacang panjang	Kg	0,32	24. Air minum	M3	0,46
12. Kacang tanah	Kg	0,22	25. Bensin	Liter	1,02
13. Tempe	Kg	0,79	26. Minyak tanah	Liter	1,74
14. Jeruk	Kg	0,39	27. Sewa Rumah	Unit	11,56
			Total		37,52

Penghitungan daya beli (PPP) dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.1. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam Tabel 2.2. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp.732.720,- sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp.300.000,-. Pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp.360.000,-

### 2.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

## METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})} \dots\dots\dots (1)$$

- $X_{(i,j)}$  = Komponen IPM ke-i dari daerah j
- $X_{(i-\min)}$  = Nilai minimum dari Komponen IPM ke-i
- $X_{(i-\max)}$  = Nilai maksimum dari Komponen IPM ke-i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM**

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata2 Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732,720 <sup>a</sup>	300,000 (1996) 360,000 <sup>b</sup> (1999, 2002)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

*Keterangan*

<sup>a)</sup> *Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018*

<sup>b)</sup> *Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru*

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Penghitungan masing-masing indeks dilakukan mengikuti rumus nomor 1. Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i,j)} \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

- Indeks  $X_{(i,j)}$  = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke j;
- i = 1, 2, 3
- j = 1, 2 ..... k wilayah

# HASIL-HASIL IPM

3

## HASIL-HASIL IPM

---

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Secara keseluruhan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi selama periode 1996-2008 menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya IPM dengan laju tingkat pencapaian menuju sasaran (*shortfall reduction*) yang cukup besar hampir di seluruh provinsi yang masih tergolong rendah tingkat pembangunan manusianya. Selain itu kesenjangan capaian IPM tahun 2008 semakin pendek, yaitu antara IPM terendah 64,00 (Papua) dan IPM tertinggi 77,03 (DKI Jakarta) jaraknya semakin dekat, dimana pada tahun 2007 IPM tertinggi adalah sebesar 76,59 (DKI Jakarta) dan IPM terendah sebesar 63,41 (Papua). Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota berikut komponennya.

### 3.1 Perkembangan IPM

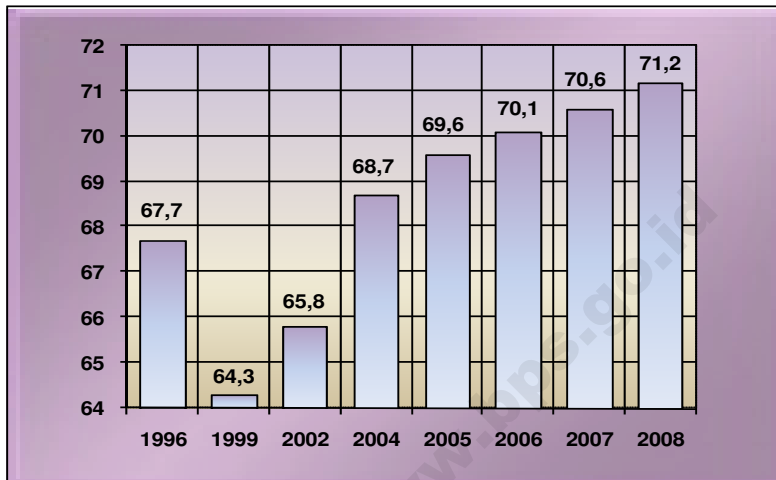
Selain IPM yang dihitung BPS, UNDP juga menghitung HDI (*Human Development Index*) untuk membandingkan pembangunan manusia di beberapa negara. HDI atau IPM yang dihitung UNDP menggunakan indikator yang sedikit berbeda dengan IPM yang dihitung BPS. Hal ini terkait dengan ketersediaan data untuk tingkat negara. Perbedaan terletak pada penggunaan PDRB per kapita riil sebagai ukuran daya beli dan *Gross Enrolment Ratio* sebagai pendekatan indikator pendidikan yang menggantikan MYS.

Pada tahun 1996, setahun sebelum krisis, IPM Indonesia versi UNDP mencapai angka 67,7 dan berada di peringkat 99. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Cambodia, dan Myanmar. Namun, sebagai akibat krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, IPM Indonesia pada tahun 1999 bergerak turun menjadi 64,3, sehingga Indonesia berada di peringkat 110 dari 177 negara (UNDP, 2004).

Pada tahun 2007 posisi Indonesia berada di urutan 111 dari 182 negara dengan angka IPM sebesar 73,4. Sampai saat ini Indonesia masih dikelompokkan sebagai negara kelompok menengah atas. Diantara negara-negara Asia Tenggara, kualitas hidup Indonesia masih berada dibawah Singapura yang berada di urutan 23

(94,4), Brunei Darussalam di peringkat 30 (92,0), Malaysia peringkat 66 (82,9), Thailand peringkat 86 (78,3), dan Filipina peringkat 105 (75,1). Namun demikian, IPM Indonesia masih lebih baik dari negara Vietnam yang berada di peringkat 116, dan Laos di peringkat 133.

**Gambar 3.1 Perkembangan IPM, Tahun 1996-2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

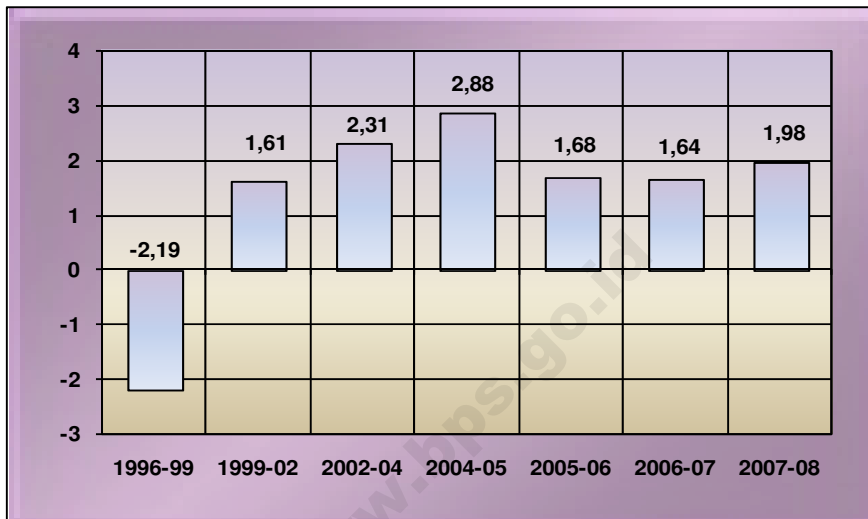
Sementara itu, perkembangan IPM Indonesia berdasarkan penghitungan BPS dapat dilihat dalam Gambar 3.1. Secara umum pembangunan manusia di Indonesia selama periode 1996-2008 mengalami peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan beberapa indikator sosial. Misalnya, angka melek huruf dewasa terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah. Indikator lain juga mencatat kemajuan. Angka kematian bayi terus menurun dan persentase balita kurang gizi juga terus berkurang. Perbaikan IPM juga sepatutnya diikuti oleh menurunnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 1999 capaian IPM Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun 1996, yaitu turun 3,4 poin menjadi 64,3. Capaian IPM ini kembali naik pada tahun 2002 menjadi 65,8, akan tetapi kenaikan tersebut masih belum mampu melampaui IPM Indonesia tahun 1996. Semenjak tahun 2004-2008, angka IPM secara signifikan terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2004 yang telah mampu mengembalikan keadaan pada posisi

## HASIL-HASIL IPM

tahun 1996 bahkan melampauinya, yaitu sebesar 68,7. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 capaian IPM terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 71,17 pada tahun 2008.

**Gambar 3.2 Perkembangan Reduksi *Shortfall*, Tahun 1996-2008**

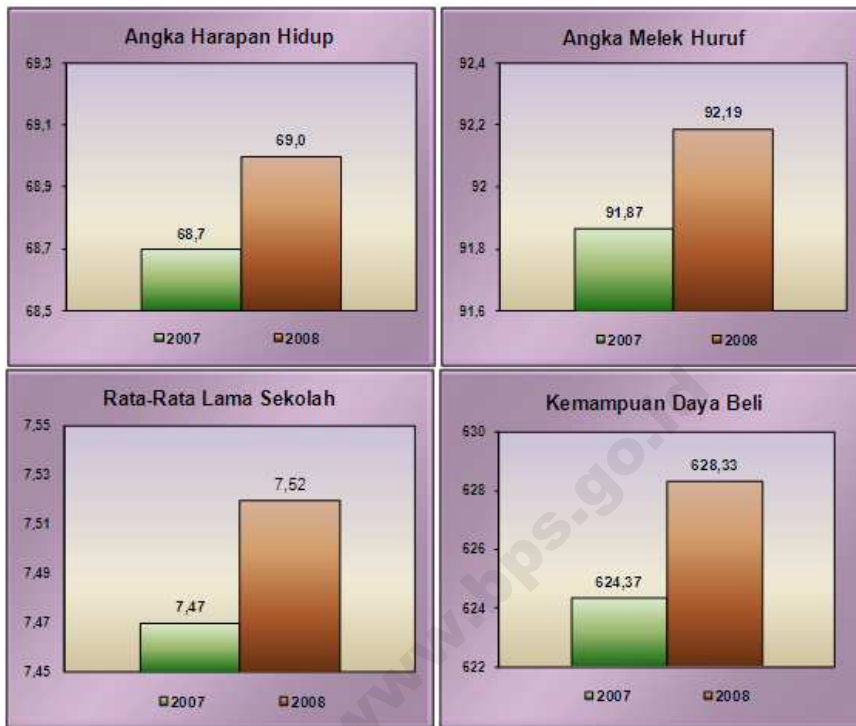


Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Pola perkembangan IPM selama periode 1996-2008 menunjukkan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi *shortfall*. Sepanjang tiga periode, yaitu (1999-2002, 2002-2004, 2004-2005,) reduksi *shortfall* secara perlahan meningkat hingga menjadi 2,88. Tetapi pada periode 2005-2006 reduksi *shortfall* kembali menurun menjadi 1,68 dan 1,76 untuk periode 2006-2007, dan 1,98 untuk periode 2007-2008. Hal ini memberi indikasi meski kualitas penduduk sudah semakin membaik, namun kecepatan pertumbuhan IPM relatif melambat.

Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM selama periode 2007-2008. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/rate dari komponen IPM angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Adapun perubahan dari masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Gambar 3.3 Perkembangan Komponen IPM, 2007-2008



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Selama periode 2007-2008, angka IPM menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah yang terus membaik dari waktu ke waktu. Keseriusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengupayakan segala bentuk kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses sarana pendidikan dan kesehatan yang mendasar terus ditingkatkan. Upaya tersebut antara lain ditempuh baik melalui peningkatan kualitas serta penambahan jumlah sarana maupun pembebasan pungutan/biaya untuk mendapatkan pelayanan (BOS, keaksaraan fungsional dan pendidikan luar sekolah, pelayanan kesehatan gratis, dsb).

Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata seiring dengan



## HASIL-HASIL IPM

---

keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai selama setahun terakhir pada proses pembangunan manusia perlu kiranya kita telaah satu per satu kemajuan yang didapat untuk masing-masing komponen IPM.

Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, pencapaian angka IPM nasional relatif terus membaik. Pada tahun 2006 misalnya, angka IPM Indonesia telah mencapai 70,10 dan kemudian menunjukkan kenaikan sebesar 0,49 pada tahun 2007 menjadi 70,59. Begitu halnya selama tahun 2007-2008 juga terjadi peningkatan IPM sebesar 0,58 poin, yaitu menjadi 71,17. Hal ini membuktikan, bahwa pertumbuhan IPM secara nasional dari tahun ke tahun konsisten menunjukkan kenaikan, walaupun besaran kenaikannya tidak selalu meningkat.

Disadari, memang tidak mudah untuk meningkatkan komponen IPM seperti angka harapan hidup karena angka harapan hidup sangat tergantung dari angka kematian dalam suatu periode tertentu. Dalam jangka waktu satu tahun angka harapan hidup kenaikannya tidak lebih dari 1 tahun, itupun jika tidak ada kematian. Sementara rata-rata lama sekolah tergantung dari partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Jadi, yang paling memungkinkan dilakukan untuk mempercepat laju IPM adalah dengan meningkatkan kemampuan daya beli penduduk (Razali, opini Kompas).

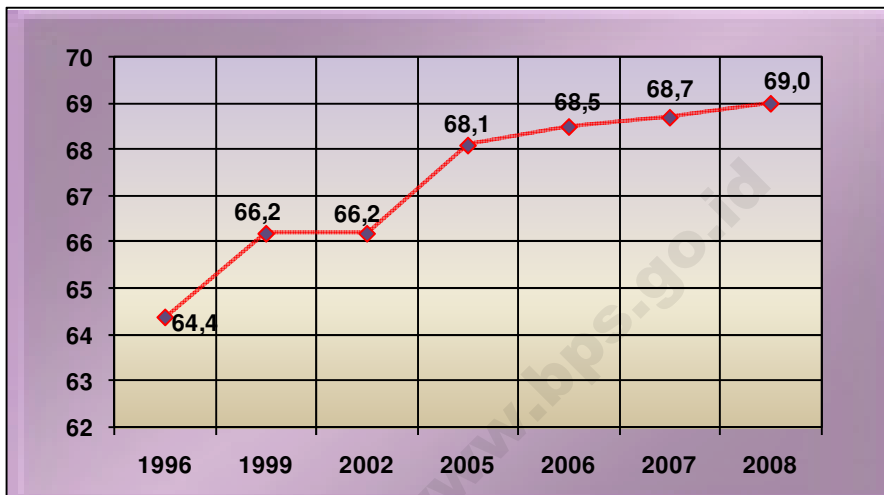
### 3.2 Perkembangan Komponen IPM

#### 3.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.4 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 12 tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat, selama periode 1996-2008 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1999, AHH penduduk Indonesia telah mencapai 66,2 tahun. AHH ini masih lebih baik dibandingkan dengan AHH Laos PDR, Cambodia dan Myanmar. Namun, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, AHH Indonesia masih tertinggal (ASEAN, 2005). Perkembangan

selanjutnya, selama tahun 1999-2002 AHH tidak menunjukkan peningkatan, yaitu tetap sebesar 66,2 tahun. Setelah berjalan tiga tahun kemudian, yaitu dari tahun 2002-2005 AHH meningkat sebesar 1,9 poin sehingga menjadi 68,1. Kemudian pada tahun 2005-2008 AHH mulai menunjukkan perkembangan meningkat dari 68,1 menjadi 69,0 pada tahun 2008.

**Gambar 3.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup, 1996-2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Capaian angka harapan hidup Indonesia masih belum menggembirakan, walaupun terjadi peningkatan angka harapan hidup sebesar 0,30 tahun selama tahun 2007-2008. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut mampu mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Untuk itu perlu upaya peningkatan kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat kesehatan yang direfleksikan melalui penurunan angka kematian bayi. Tingkat kesehatan bayi juga dipengaruhi secara nyata oleh kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit anak yang terpaksa terlahir dengan berat badan lahir rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekurangan gizi.

## HASIL-HASIL IPM

**Tabel 3.1 Angka Harapan Hidup dan Peringkatnya Menurut Provinsi, 2007-2008**

Provinsi	AHH		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	68,4	68,5	19	19
SUMATERA UTARA	69,1	69,2	12	12
SUMATERA BARAT	68,8	69,0	15*	15*
RIAU	71,0	71,1	4	5
JAMBI	68,6	68,8	17	17
SUMATERA SELATAN	69,0	69,2	13	13
BENGKULU	69,2	69,4	11	11
LAMPUNG	68,8	69,0	15*	15*
KEP. BANGKA BELITUNG	68,5	68,6	18	18
KEPULAUAN RIAU	69,6	69,7	9	9
DKI JAKARTA	72,8	72,9	2	2
JAWA BARAT	67,6	67,8	21*	22
JAWA TENGAH	70,9	71,1	5*	4
D I YOGYAKARTA	73,1	73,1	1	1
JAWA TIMUR	68,9	69,1	14	14
BANTEN	64,5	64,6	31	31
BALI	70,6	70,6	7*	8
NUSA TENGGARA BARAT	61,2	61,5	33	33
NUSA TENGGARA TIMUR	66,7	67,0	26	25
KALIMANTAN BARAT	66,1	66,3	27	27
KALIMANTAN TENGAH	70,9	71,0	5*	6
KALIMANTAN SELATAN	62,6	63,1	32	32
KALIMANTAN TIMUR	70,6	70,8	7*	7
SULAWESI UTARA	72,0	72,0	3	3
SULAWESI TENGAH	65,9	66,1	28*	29
SULAWESI SELATAN	69,4	69,6	10	10
SULAWESI TENGGARA	67,2	67,4	23*	23*
GORONTALO	65,9	66,2	28*	28
SULAWESI BARAT	67,2	67,4	23*	23*
MALUKU	66,8	67,0	25	26
MALUKU UTARA	65,1	65,4	30	30
PAPUA BARAT	67,6	67,9	21*	21
PAPUA	67,9	68,1	20	20
<b>Indonesia</b>	<b>68,7</b>	<b>69,0</b>		

Keterangan: \* peringkat sama

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Dilihat menurut tingkatan provinsi, Angka Harapan Hidup tahun 2008 relatif bervariasi antara 73,10 sampai 61,50 tahun, Yogyakarta sebagai provinsi yang mempunyai angka harapan hidup tertinggi sedangkan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan angka harapan hidup terendah. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menempati urutan kedua tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 72,90 tahun dan diikuti Sulawesi Utara di peringkat ketiga tertinggi dengan angka harapan hidup mencapai 72,0 tahun. Di sisi lain, urutan kedua terendah, di atas Nusa Tenggara Barat, adalah Kalimantan Selatan dengan angka harapan hidup sebesar 63,1 tahun, yang kemudian diikuti Banten di urutan ketiga terendah dengan angka harapan hidup sebesar 64,6 tahun. Namun demikian, secara umum angka harapan hidup penduduk seluruh provinsi berada di atas 61 tahun.

### 3.2.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif cukup nyata di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda memerlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai, terutama ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun.

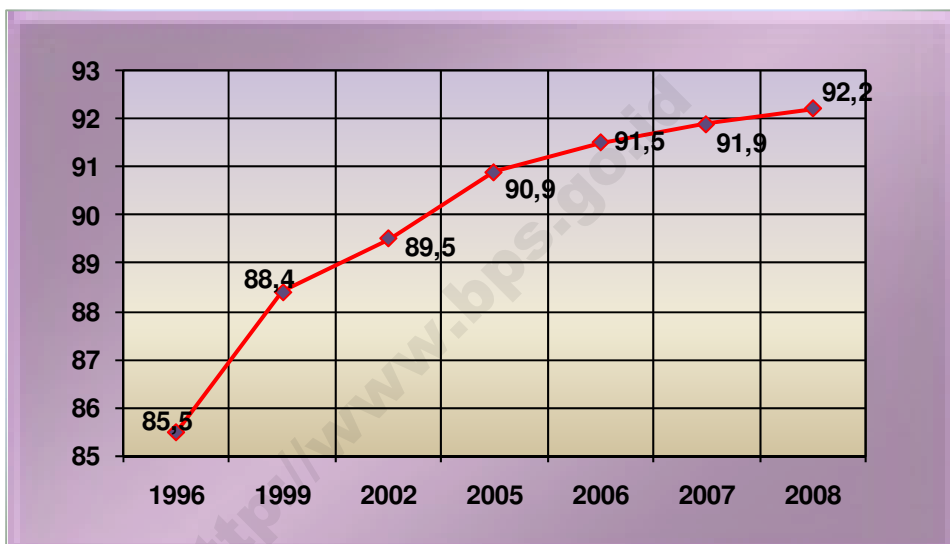
Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa lalu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memelihara upaya-upaya positif yang telah dirintis serta lebih mempertajam sehingga dapat dihasilkan capaian yang secara nyata lebih baik dari yang kita rasakan saat ini. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang waktu 3-5 tahun ke depan akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

## HASIL-HASIL IPM

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 1996-2008 menunjukkan adanya peningkatan secara terus menerus meskipun kecepatannya relatif menurun. Peningkatan yang cukup cepat terjadi pada periode 1996-1999, yaitu sebesar 2,9 persen poin. Pada tahun 1996 angka melek huruf baru sebesar 85,5 persen sedangkan pada tahun 1999 telah mencapai 88,4 persen. Meski antara periode tersebut terjadi krisis, tampaknya hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan AMH di Indonesia.

**Gambar 3.5 Perkembangan Angka Melek Huruf 1996-2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Pada periode berikutnya perkembangan AMH menunjukkan perlambatan kecepatan. Pada periode 1999-2002, AMH hanya meningkat sebesar 1,1 persen poin sedangkan pada periode 2002-2005 meningkat kembali menjadi 1,4 persen poin. Namun sayang, sejak periode 2005-2006 perkembangan AMH mulai kembali melambat menjadi 0,6 persen poin, kemudian menjadi 0,4 persen poin pada periode 2006-2007, dan 0,3 persen poin pada periode 2007-2008 (Gambar 3.5). Secara umum, peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 1996-2008 cukup menggembirakan, meski masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, kecuali Laos PDR dan Kamboja.

**Tabel 3.2. Angka Melek Huruf dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008**

Provinsi	AMH		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	96,20	96,20	8	10
SUMATERA UTARA	97,03	97,08	6	6
SUMATERA BARAT	96,10	96,66	9	8
RIAU	97,80	97,81	4	4
JAMBI	96,00	96,05	10*	11
SUMATERA SELATAN	96,66	97,05	7	7
BENGKULU	94,69	94,87	20	20
LAMPUNG	93,47	93,63	21	21
KEP. BANGKA BELITUNG	95,40	95,57	15	16
KEPULAUAN RIAU	96,00	96,00	10*	12
DKI JAKARTA	98,76	98,76	2	2
JAWA BARAT	95,32	95,53	16	17
JAWA TENGAH	88,62	89,24	25	26
D I YOGYAKARTA	87,78	89,46	26	24
JAWA TIMUR	87,42	87,43	27	28
BANTEN	95,60	95,60	14	15
BALI	86,21	86,94	31	30
NUSA TENGGARA BARAT	80,10	80,13	32	32
NUSA TENGGARA TIMUR	87,25	87,66	28	27
KALIMANTAN BARAT	89,40	89,40	24	25
KALIMANTAN TENGAH	97,50	97,67	5	5
KALIMANTAN SELATAN	95,26	95,30	17	19
KALIMANTAN TIMUR	95,70	96,36	13	9
SULAWESI UTARA	99,30	99,31	1	1
SULAWESI TENGAH	94,94	95,68	19	14
SULAWESI SELATAN	86,24	86,53	30	31
SULAWESI TENGGARA	91,30	91,42	22	23
GORONTALO	95,75	95,75	12	13
SULAWESI BARAT	86,40	87,31	29	29
MALUKU	98,00	98,12	3	3
MALUKU UTARA	95,20	95,44	18	18
PAPUA BARAT	90,32	92,15	23	22
PAPUA	75,41	75,41	33	33
<b>Indonesia</b>	<b>91,87</b>	<b>92,19</b>		

Keterangan: \* peringkat sama

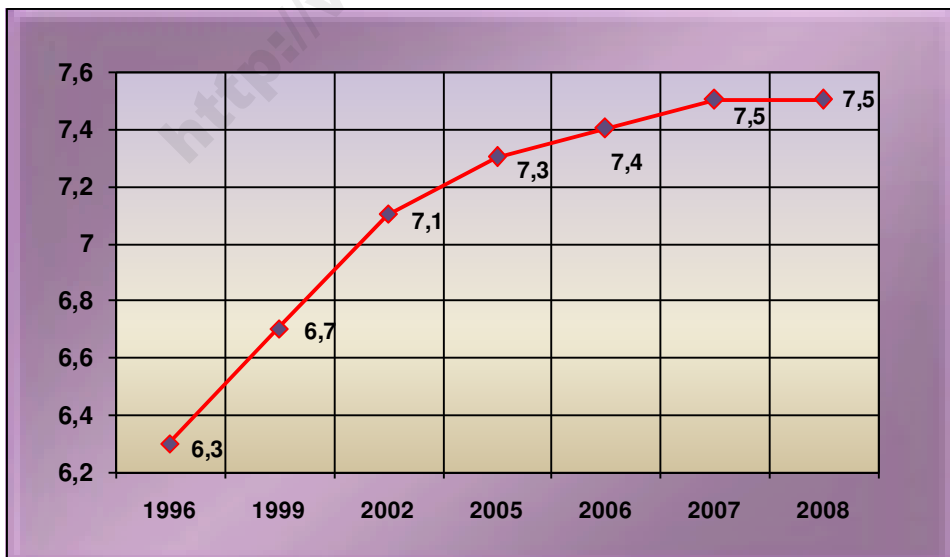
Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

## HASIL-HASIL IPM

Dilihat menurut tingkatan provinsi, pada periode 2007-2008, Sulawesi Utara memiliki AMH tertinggi, yaitu mencapai 99,31 persen yang kemudian diikuti oleh DKI Jakarta di peringkat ke dua tertinggi sebesar 98,76 persen dan Maluku di peringkat ketiga tertinggi sebesar 98,12 persen. Sementara itu, dilain pihak, Papua menjadi provinsi yang memiliki AMH terendah yaitu sebesar 75,41 persen, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Barat di peringkat dua terendah dengan AMH sebesar 80,13 persen dan Sulawesi Selatan di peringkat tiga terendah dengan AMH sebesar 86,53 persen.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 1996-2008, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang relatif lambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,3 tahun pada tahun 1996 menjadi 7,5 tahun pada tahun 2008. Hal ini berarti tingkat pendidikan penduduk Indonesia meningkat dari setara dengan lulus tingkat sekolah dasar pada tahun 1996, menjadi setara dengan kelas satu sekolah tingkat menengah pertama pada tahun 2008. Selama 12 tahun, kenaikan rata-rata lama sekolah hanya sebesar 1,2 tahun atau kurang dari 0,2 poin per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

**Gambar 3.6 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, 1996-2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

**Tabel 3.3. Rata-rata Lama Sekolah dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008**

Provinsi	Rata2 Lama Sekolah		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	8,50	8,50	9	10
SUMATERA UTARA	8,60	8,60	5*	6*
SUMATERA BARAT	8,18	8,26	11	11
RIAU	8,40	8,51	10	9
JAMBI	7,63	7,63	18	19
SUMATERA SELATAN	7,60	7,60	19	20
BENGKULU	8,00	8,00	13*	13*
LAMPUNG	7,30	7,30	23	24
KEP. BANGKA BELITUNG	7,18	7,37	25	23
KEPULAUAN RIAU	8,94	8,94	2	2
DKI JAKARTA	10,80	10,80	1	1
JAWA BARAT	7,50	7,50	21	21
JAWA TENGAH	6,80	6,86	28	29
D I YOGYAKARTA	8,59	8,71	8	5
JAWA TIMUR	6,90	6,95	27	27
BANTEN	8,10	8,10	12	12
BALI	7,60	7,81	20	15*
NUSA TENGGARA BARAT	6,70	6,70	29*	30*
NUSA TENGGARA TIMUR	6,42	6,55	33	32
KALIMANTAN BARAT	6,70	6,70	29*	30*
KALIMANTAN TENGAH	8,00	8,00	13*	13*
KALIMANTAN SELATAN	7,40	7,44	22	22
KALIMANTAN TIMUR	8,80	8,80	3*	3*
SULAWESI UTARA	8,80	8,80	3*	3*
SULAWESI TENGAH	7,73	7,81	15	15*
SULAWESI SELATAN	7,23	7,23	24	25
SULAWESI TENGGARA	7,71	7,74	16	17
GORONTALO	6,91	6,91	26	28
SULAWESI BARAT	6,51	6,99	32	26
MALUKU	8,60	8,60	5*	6*
MALUKU UTARA	8,60	8,60	5*	6*
PAPUA BARAT	7,65	7,67	17	18
PAPUA	6,52	6,52	31	33
<b>Indonesia</b>	<b>7,47</b>	<b>7,52</b>		

Keterangan: \* peringkat sama

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran



## HASIL-HASIL IPM

---

Dilihat menurut tingkatan provinsi, DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki rata-rata lama sekolah paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, yaitu mencapai 10,8 tahun. Tertinggi kedua adalah provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,94 tahun dan tertinggi ketiga adalah Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, yaitu masing-masing sebesar 8,8 tahun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar berada di urutan 5 dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,71 tahun.

Sementara itu, di lain pihak, provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Papua, yaitu sebesar 6,52 tahun, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur pada peringkat kedua terendah sebesar 6,55 tahun. Sedangkan untuk peringkat ketiga terendah ditempati oleh dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat yang masing-masing memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 6,7 tahun.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Program pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

Apabila capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk di Indonesia relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP (15 tahun atau setara dengan lulus sekolah menengah pertama). Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas.

### 3.2.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat adanya standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

**Gambar 3.7 Perkembangan Daya Beli Masyarakat, Tahun 1999-2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 terlihat terus meningkat kecuali pada tahun 1999. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada periode 1996-1999 erat kaitannya dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang memburuk sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya, setelah tahun 1999 daya beli masyarakat kembali terlihat mulai membaik dan pada tahun 2002 daya beli masyarakat sudah lebih tinggi dari pada tahun 1996 atau sebelum terjadinya krisis. Pada periode 2002-2005, daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu

## HASIL-HASIL IPM

rata-rata mencapai 9,57 ribu per tahun. Namun pada periode-periode berikutnya, peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat, yaitu dari 619,9 ribu pada tahun 2005 menjadi 621,3 ribu pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 624,4 ribu dan pada tahun 2008 kembali naik menjadi 628,3 ribu.

**Tabel 3.4. Pengeluaran per kapita dan Peringkatnya Menurut Provinsi, Tahun 2007-2008**

Provinsi	Daya Beli		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	600,95	605,56	29	28
SUMATERA UTARA	624,12	629,97	14	12
SUMATERA BARAT	625,93	631,52	9	9
RIAU	634,11	638,31	2	2
JAMBI	622,99	628,25	16	14
SUMATERA SELATAN	617,59	623,49	23	23
BENGKULU	620,29	625,66	20	18
LAMPUNG	610,09	615,03	26	26
KEP. BANGKA BELITUNG	631,75	636,07	4	5
KEPULAUAN RIAU	631,94	637,67	3	3
DKI JAKARTA	620,78	625,70	19	17
JAWA BARAT	623,64	626,81	15	15
JAWA TENGAH	628,53	633,59	7	7
D I YOGYAKARTA	639,88	643,25	1	1
JAWA TIMUR	630,71	636,61	5	4
BANTEN	621,00	625,52	18	20
BALI	624,90	626,63	12	16
NUSA TENGGARA BARAT	630,48	633,58	6	8
NUSA TENGGARA TIMUR	594,28	599,93	30	30
KALIMANTAN BARAT	617,90	624,74	22	22
KALIMANTAN TENGAH	624,79	628,64	13	13
KALIMANTAN SELATAN	625,80	630,83	10	10
KALIMANTAN TIMUR	628,10	634,52	8	6
SULAWESI UTARA	619,39	625,58	21	19
SULAWESI TENGAH	616,98	622,35	24	24
SULAWESI SELATAN	625,23	630,81	11	11
SULAWESI TENGGARA	604,96	611,72	27	27
GORONTALO	615,94	619,70	25	25
SULAWESI BARAT	622,90	625,04	17	21
MALUKU	601,26	605,02	28	29
MALUKU UTARA	593,88	595,69	31	32
PAPUA BARAT	592,07	593,13	33	33
PAPUA	593,42	599,65	32	31
<b>Indonesia</b>	<b>624,37</b>	<b>628,33</b>		

Keterangan: \* peringkat sama

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Dilihat menurut tingkatan provinsi, diketahui bahwa daya beli masyarakat cukup bervariasi, mulai dari 593,13 ribu hingga 643,25 ribu. Lebih lanjut, diketahui bahwa tiga provinsi yang memiliki daya beli paling tinggi berasal dari Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan daya beli mencapai 643,25 ribu, kemudian diikuti Riau di peringkat kedua yang mencapai 638,31 ribu, dan peringkat ketiga adalah Kepulauan Riau yang mencapai 637,67 ribu. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemampuan daya beli masyarakat terendah berasal dari Wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua Barat dengan daya beli masyarakat sebesar 593,13 ribu, kemudian diikuti Maluku Utara dan Papua dengan daya beli masyarakatnya masing-masing sebesar 595,69 ribu dan 599,65 ribu.

<http://www.bps.go.id>

**DISPARITAS  
ANTAR  
WILAYAH**

**4**

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

---

Disparitas pembangunan antar wilayah masih merupakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Indikator masih tingginya kesenjangan antar daerah dicerminkan ke dalam empat masalah yaitu:

- Disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.
- Disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dengan masih rendahnya peningkatan akses pendidikan, melek huruf, dan partisipasi sekolah. yang terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah Indonesia.
- Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah
- Disparitas prasarana antar daerah yang sangat tinggi.

Secara khusus, disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang tercermin dalam IPM akan dibahas dalam bab ini. Dalam analisis disparitas antar wilayah tidak dapat dilepaskan dari ulasan mengenai capaian IPM antar wilayah. Analisis capaian IPM antar wilayah berisi angka IPM, peringkat IPM dan reduksi *shortfall* provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu disparitas pembangunan manusia lebih merupakan perbandingan IPM antar daerah.

### 4.1 Capaian IPM Provinsi

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (ranking) antar daerah. Sebenarnya untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (ranking), akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.

Perkembangan IPM provinsi di Indonesia menunjukkan suatu peningkatan. Rata-rata nilai IPM untuk nasional pada tahun 2008 sebesar 71,17 sementara pada tahun 2007 sebesar 70,59. Angka ini menutupi variasi nilai IPM antar provinsi, dimana terdapat perbedaan pencapaian IPM. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 13,03 poin dengan rentang 77,03 untuk DKI Jakarta dan 64,00 untuk Papua. Dibandingkan

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

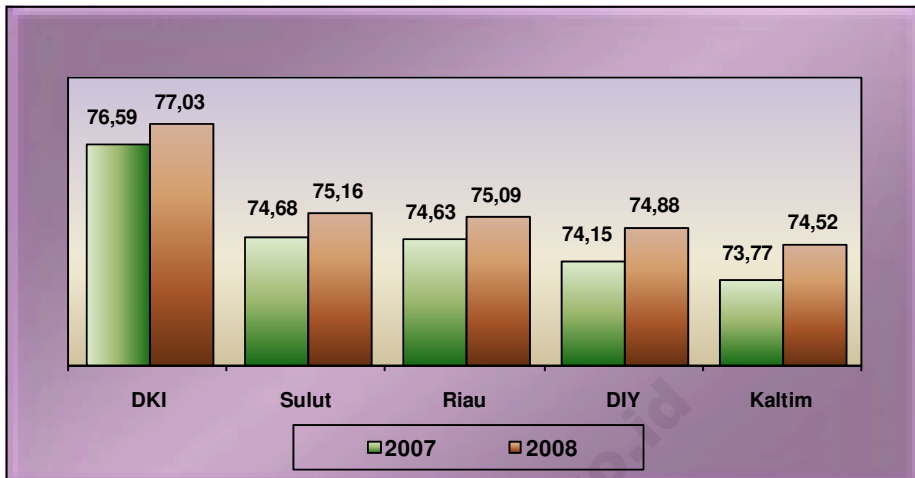
dengan perbedaan pencapaian tahun 2007 yang sebesar 13,2 poin, maka perbedaan tahun 2008 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi pada tahun 2008 relatif menurun dibanding tahun 2007.

**Tabel 4.1 Peringkat IPM menurut Provinsi**

Provinsi	Peringkat Provinsi		IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2007- 2008
	2007	2008	2007	2008	
(1)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)
NAD	17	17	70,35	70,76	1,39
SUMATERA UTARA	8	8	72,78	73,29	1,90
SUMATERA BARAT	9	9	72,23	72,96	2,62
RIAU	3	3	74,63	75,09	1,82
JAMBI	12	13	71,46	71,99	1,85
SUMATERA SELATAN	13	12	71,40	72,05	2,28
BENGKULU	11	11	71,57	72,14	1,99
LAMPUNG	19	20	69,78	70,30	1,74
KEP. BANGKA BELITUNG	10	10	71,62	72,19	2,01
KEPULAUAN RIAU	6	6	73,68	74,18	1,89
DKI JAKARTA	1	1	76,59	77,03	1,86
JAWA BARAT	15	15	70,71	71,12	1,38
JAWA TENGAH	14	14	70,92	71,60	2,35
D I YOGYAKARTA	4	4	74,15	74,88	2,81
JAWA TIMUR	19	18	69,78	70,38	2,00
BANTEN	23	23	69,29	69,70	1,32
BALI	16	16	70,53	70,98	1,55
NUSA TENGGARA BARAT	32	32	63,71	64,12	1,14
NUSA TENGGARA TIMUR	31	31	65,36	66,15	2,28
KALIMANTAN BARAT	29	29	67,53	68,17	1,96
KALIMANTAN TENGAH	7	7	73,49	73,88	1,47
KALIMANTAN SELATAN	26	26	68,01	68,72	2,20
KALIMANTAN TIMUR	5	5	73,77	74,52	2,87
SULAWESI UTARA	2	2	74,68	75,16	1,91
SULAWESI TENGAH	22	22	69,34	70,09	2,45
SULAWESI SELATAN	21	21	69,62	70,22	1,99
SULAWESI TENGGARA	25	25	68,32	69,00	2,15
GORONTALO	24	24	68,83	69,29	1,46
SULAWESI BARAT	28	27	67,72	68,55	2,59
MALUKU	18	18	69,96	70,38	1,42
MALUKU UTARA	27	28	67,82	68,18	1,11
PAPUA BARAT	30	30	67,28	67,95	2,05
PAPUA	33	33	63,41	64,00	1,62
<b>Indonesia</b>			<b>70,59</b>	<b>71,17</b>	<b>1,98</b>

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

**Gambar 4.1 Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2007-2008**

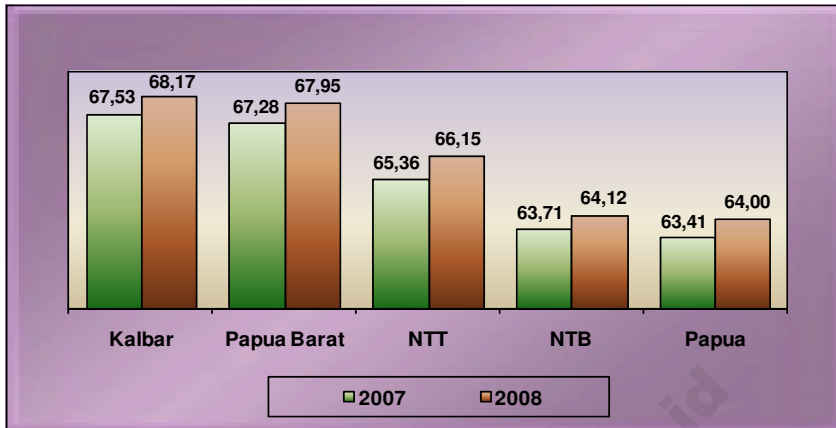


Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2008 DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 77,03. Kemudian berturut-turut diikuti oleh provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,16, provinsi Riau sebesar 75,09, provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,88, dan provinsi Kalimantan Timur sebesar 74,52 (Gambar 4.1). Berdasarkan historinya selama tiga tahun terakhir keempat provinsi ini selalu tercatat sebagai empat provinsi terbaik dalam pembangunan manusia, kecuali untuk provinsi Kalimantan Timur baru 2 tahun terakhir ini masuk dalam kelompok 5 provinsi dengan IPM tertinggi. Sebelumnya urutan kelima ditempati oleh provinsi Kalimantan Tengah, yang turun ke urutan ke tujuh selama dua tahun berturut-turut.

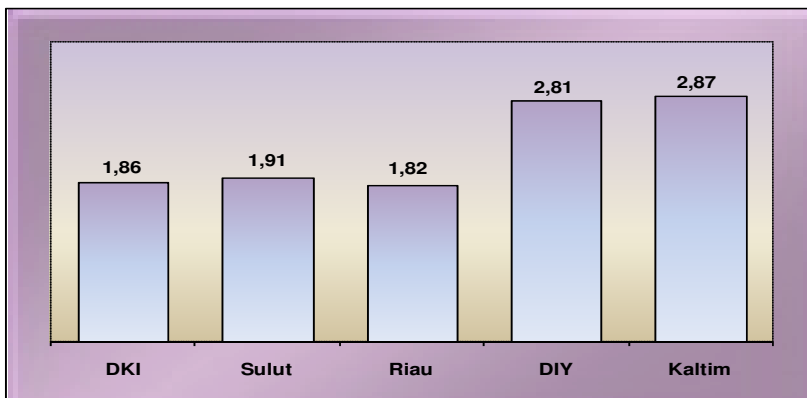
Papua merupakan provinsi dengan pencapaian IPM terendah, yaitu sebesar 64,00. Pada Gambar 4.2, empat provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (64,12), Nusa Tenggara Timur (66,15), Papua Barat (67,95), dan Kalimantan Barat (68,17). Dua tahun berturut-turut provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi kelima terendah, menggantikan posisi provinsi Sulawesi Barat yang pada tahun 2007 berada di posisi keenam terendah, dan tahun 2008 di posisi ketujuh terendah.



**Gambar 4.2 Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2007-2008**

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Selama periode 2007-2008, IPM di semua provinsi mengalami kenaikan dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah provinsi mengalami peningkatan IPM secara cepat, dan sebaliknya ada pula provinsi dengan peningkatan IPM relatif lambat. Laju kecepatan peningkatan IPM masing-masing provinsi berbeda. Kecepatan peningkatan IPM ini sangat tergantung dari tinggi rendahnya angka IPM yang dicapai. Sebagai ilustrasi, provinsi dengan IPM tinggi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM (*hardcore*). Sebaliknya, sangat mudah bagi provinsi yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (*softcore*).

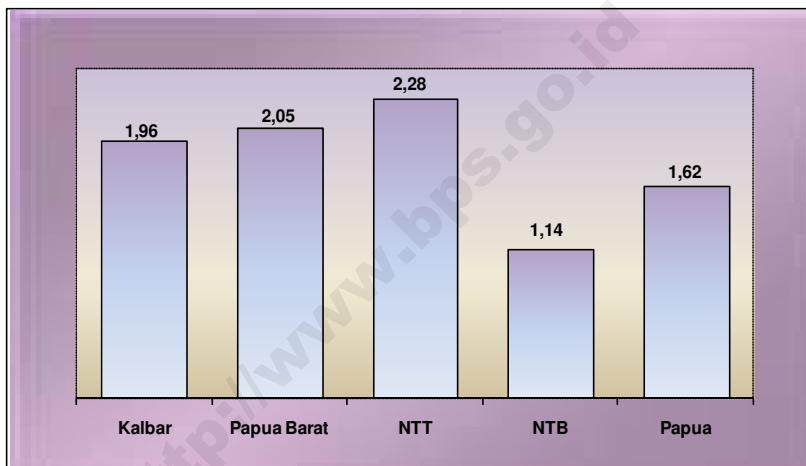
**Gambar 4.3 Reduksi *Shortfall* Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2008**

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

DKI merupakan contoh provinsi dalam kelompok *hardcore*. Selama tiga tahun terakhir capaian IPM DKI paling tinggi namun reduksi *shortfall*-nya relatif rendah sekitar 1,86. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian IPM DKI Jakarta sudah cukup tinggi sehingga kecepatan pembangunan di provinsi ini sudah semakin melambat dibandingkan provinsi lain. Sebaliknya, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok *softcore*. Capaian IPM provinsi tergolong rendah, yaitu sebesar 66,15, sehingga untuk meningkatkan angka IPM-nya relatif lebih mudah. Hal ini dapat dilihat dari reduksi *shortfall* provinsi tersebut yang mencapai 2,28.

**Gambar 4.4 Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2008**



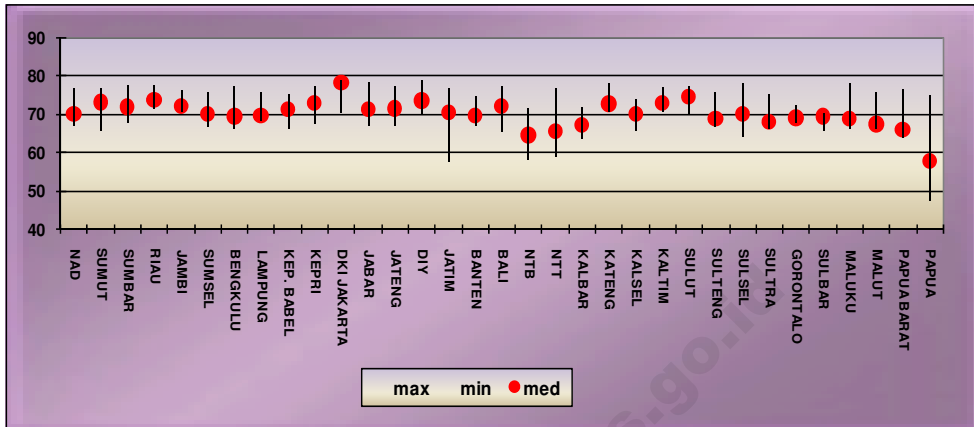
Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Namun demikian, ada beberapa pengecualian dimana provinsi yang termasuk dalam kelompok *hardcore* masih mampu memiliki kecepatan pembangunan yang tinggi atau sebaliknya provinsi yang termasuk dalam kelompok *softcore* memiliki kecepatan pembangunan yang rendah. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta yang meskipun capaian IPM keduanya sudah cukup tinggi tetapi reduksi *shortfall*-nya justru paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya, yaitu sebesar 2,87 dan 2,81. Jika dilihat lebih rinci, kecepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya kenaikan daya beli di masing-masing provinsi. Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua, yang meskipun capaian IPM keduanya paling rendah, tetapi reduksi *shortfall*-nya juga relatif rendah, yaitu sebesar 1,14 dan 1,62. Hal ini menggambarkan bahwa capaian dan kecepatan pembangunan

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya.

**Gambar 4.5 Kisaran IPM Tingkat Provinsi Tahun 2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Dilihat dari kisaran IPM menurut provinsi seperti pada Gambar 4.5 terlihat bahwa sebaran IPM di hampir semua provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa provinsi seperti Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian IPM dalam provinsi (baca: kabupaten/kota) yang bersangkutan sebarannya sangat beragam (Gambar 4.5). Sebagai ilustrasi, di provinsi Jawa Timur, kabupaten dengan pencapaian IPM terendah adalah di wilayah tapal kuda, sedangkan wilayah tengah dan utara cenderung lebih tinggi IPM-nya. Di Provinsi Papua, kabupaten dengan IPM terendah umumnya merupakan kabupaten baru (seperti Kabupaten Nduga, Yalimo, Memberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Puncak) sedangkan kabupaten dengan IPM tinggi merupakan ibukota provinsi dan kabupaten-kabupaten besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Biak Namfor, dan Yapen Waropen. Sementara itu, provinsi yang memiliki sebaran IPM relatif paling homogen dibandingkan provinsi lainnya adalah Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

### 4.1.1 Status Pembangunan Provinsi

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori menengah atas ( $66 \leq IPM < 80$ ), kategori menengah bawah ( $50 \leq IPM < 66$ ) dan kategori rendah ( $IPM < 50$ ). Jika diukur menurut skala internasional, dari 33 provinsi di Indonesia, pada tahun 2008, sebanyak 31 provinsi masuk dalam kategori IPM menengah atas dan 2 provinsi lainnya masuk dalam kategori IPM menengah bawah. Dibandingkan dengan IPM provinsi tahun 2007, komposisi IPM tahun 2008 sedikit mengalami perubahan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur naik ke dalam kategori menengah atas.

Sementara itu, untuk IPM per kabupaten/kota terdapat perubahan yang cukup menggembirakan dimana semakin banyak daerah yang masuk ke dalam kelompok menengah atas. Jika pada tahun 2007 sebanyak 393 kabupaten/kota termasuk ke dalam kelompok IPM menengah atas, maka pada tahun 2008 bertambah menjadi 425 kabupaten/kota. Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang masuk kategori IPM menengah ke bawah menjadi berkurang, dari sebanyak 59 pada tahun 2007 menjadi 48 pada tahun 2008. Akan tetapi, pada kategori IPM rendah, yaitu dari sebanyak 5 kabupaten/kota pada tahun 2007 bertambah menjadi 10 kabupaten/kota pada tahun 2008. Pertambahan pada kategori IPM rendah tersebut lebih disebabkan karena bertambahnya kabupaten/kota baru hasil pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Wilayah Indonesia Timur yang sebenarnya kondisinya masih memprihatinkan.

**Tabel 4.2 Status Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota, 2007-2008**

Status Pembangunan	Provinsi		Kabupaten dan Kota	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah	-	-	5	10
Menengah Bawah	3	2	59	48
Menengah Atas	30	31	393	425
Tinggi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>457</b>	<b>483</b>

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

Hal lain yang juga perlu diungkapkan dari perkembangan IPM adalah terdapat beberapa provinsi yang mengalami kemajuan cukup pesat selama tahun 2007-2008. Kemajuan ini terlihat dari angka reduksi *shortfall* yang telah dicapai oleh provinsi yang mengalami kemajuan. Rentang reduksi *shortfall* provinsi yang mengalami kemajuan berkisar antara 2,28-2,87. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan reduksi *shortfall* tahun 2007, maka terlihat bahwa reduksi *shortfall* tahun 2008 relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2007, reduksi *shortfall* tertinggi mencapai 3,54 poin yang dicapai oleh Papua Barat, akan tetapi pada tahun 2008 reduksi *shortfall* tertinggi hanya mencapai 2,87 yang kali ini dicapai oleh Kalimantan Timur. Papua Barat sendiri pada tahun 2008 hanya mampu mencapai reduksi *shortfall* sebesar 2,05. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2008, percepatan perkembangan IPM relatif melambat jika dibandingkan dengan tahun 2007.

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa dari lima provinsi yang mengalami reduksi *shortfall* tertinggi umumnya berasal dari Wilayah Indonesia Barat dan justru telah memiliki IPM yang sudah cukup tinggi. Tiga provinsi yang berasal dari Wilayah Indonesia Timur yang memiliki reduksi *shortfall* tinggi adalah Sulawesi Barat (IPM sebesar 68,55) dan Sulawesi Tengah (IPM sebesar 70,09). Hal ini berarti bahwa meskipun telah memiliki IPM yang cukup baik pada tahun 2007, tetapi kelima provinsi di atas berhasil memaksimalkan pencapaian IPM-nya pada tahun 2008.

**Tabel 4.3 Provinsi yang Mengalami Kemajuan Pesat selama Tahun 2007-2008**

Provinsi	IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2007-2008
	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	73,77	74,52	2,87
D I YOGYAKARTA	74,15	74,88	2,81
SUMATERA BARAT	72,23	72,96	2,62
SULAWESI BARAT	67,72	68,55	2,59
SULAWESI TENGAH	69,34	70,09	2,45

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

### 4.2 Capaian IPM Kabupaten dan Kota

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM provinsi, IPM kabupaten/kota juga semuanya memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 2007-2008. Dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada umumnya berbeda, namun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota yang memperlihatkan tingkat kecepatan sama. Beberapa kabupaten/kota mencapai peningkatan IPM cukup pesat, beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan yang cukup lambat, serta ada pula yang tidak menunjukkan peningkatan sama sekali (*stagnant*).

**Tabel 4.4 Kabupaten dan Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah Tahun 2007 dan 2008**

<b>Tahun 2007</b>	<b>IPM</b>	<b>Tahun 2008</b>	<b>IPM</b>
<b>Kabupaten dan Kota IPM Tertinggi</b>		<b>Kabupaten dan Kota IPM Tertinggi</b>	
Kota Jakarta Selatan	78,5	Kota Jakarta Selatan	79,0
Kota Yogyakarta	78,1	Kota Yogyakarta	78,9
Kota Jakarta Timur	78,1	Kota Jakarta Timur	78,5
Kota Jakarta Barat	77,9	Kota Jakarta Barat	78,4
Kota Depok	77,9	Kota Depok	78,4
<b>Tahun 2007</b>	<b>IPM</b>	<b>Tahun 2008</b>	<b>IPM</b>
<b>Kabupaten dan Kota IPM Terendah</b>		<b>Kabupaten dan Kota IPM Terendah</b>	
Asmat	49,5	Lanny Jaya	48,1
Mappi	49,0	Pegunungan Bintang	47,9
Boven Digoel	48,7	Mamberamo Tengah	47,9
Yahukimo	48,3	Yalimo	47,8
Pegunungan Bintang	47,4	Nduga	47,5

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Perubahan IPM kabupaten/kota selama 2007-2008 telah menyebabkan pergeseran urutan peringkat dari kabupaten/kota. Tabel 4.4 menyajikan urutan lima kabupaten/kota tertinggi dan lima terendah selama periode 2007-2008. Pada tabel tersebut terlihat adanya pergeseran posisi kabupaten/kota untuk lima urutan terendah yang umumnya disebabkan karena terbentuknya kabupaten baru, sedangkan untuk posisi lima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi tidak

mengalami perubahan. Selain itu, dapat dilihat bahwa kelima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi semuanya berasal dari Pulau Jawa, yaitu tiga Kabupaten/kota dari Provinsi DKI Jakarta, satu kabupaten/kota berasal dari DI Yogyakarta, dan satu Kabupaten/kota dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan kelima kabupaten/kota dengan IPM terendah semuanya berasal dari provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini (Papua) masih tertinggal jauh dari provinsi lainnya, sementara pergerakan perkembangan pembangunannya juga sangat lambat.

**Tabel 4.5 Sepuluh Kabupaten dan Kota yang Menghasilkan Reduksi Shortfall Terbesar Tahun 2007-2008**

Kabupaten dan Kota	Provinsi	IPM	Reduksi Shortfall 2007-2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Pidie Jaya	NAD	71,23	4,22
Kota Sorong	Papua Barat	76,52	3,83
Teluk Wondama	Papua Barat	64,79	3,79
Majene	Sulawesi Barat	70,28	3,75
Jayawijaya	Papua	54,72	3,74
Kota Yogyakarta	DIY	78,95	3,68
Gorontalo	Gorontalo	68,94	3,65
Bulongan	Kalimantan Timur	74,30	3,61
Manokwari	Papua Barat	65,46	3,58
Jayapura	Papua	71,02	3,49

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Selanjutnya, Tabel 4.5 menyajikan kabupaten/kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2007-2008. Pada umumnya, kabupaten/kota yang mengalami kemajuan pesat adalah kabupaten/kota yang memiliki angka IPM relatif rendah. Terdapat 10 kabupaten/kota yang tersebar di beberapa provinsi yang mencatat kemajuan cukup pesat. Kemajuan pesat ini terbagi ke dalam dua golongan, yakni kategori kemajuan rentang 4 dan rentang 3. Kabupaten Pidie Jaya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencatat kemajuan yang tercepat dan menjadi satu-satunya kabupaten dengan kategori rentang 4, sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori rentang 3. Jika dibandingkan dengan tingkat kecepatan kemajuan (reduksi *shortfall*) 10 kabupaten pada periode 2006-2007 yang sebesar 4,84-6,79 per tahun, maka pada periode 2007-2008 menunjukkan tingkat kecepatan yang relatif lebih lambat, yakni berkisar antara 3,49-4,22 per tahun.

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

---

### 4.2.1 Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia di semua kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota, satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Kecepatan perubahan IPM selama 2007-2008 tercermin pada nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan skala internasional dari 483 kabupaten/kota tidak satupun kabupaten/kota tergolong IPM tinggi. Meskipun demikian, IPM yang telah dicapai oleh sekitar 89,23 persen atau 431 kabupaten/kota di Indonesia sudah tergolong ke dalam menengah atas. Kemudian, 42 kabupaten/kota atau sekitar 8,69 persennya tergolong ke dalam kelompok IPM menengah bawah dan selebihnya 10 kabupaten/kota atau setara 2,07 persen masih tergolong ke dalam kelompok IPM rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah adalah Nduga, Yalimo, Memberamo Tengah, Pegunungan Bintang dan Lanni Jaya, yang seluruhnya dari provinsi Papua.

### 4.3 Disparitas Pembangunan Manusia

Variasi pencapaian pembangunan manusia antar provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Beberapa indikator sosial dan ekonomi yang terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Gambar 4.6 memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi telah 93,94 persen mencapai kategori IPM menengah atas (66-80). Pada Gambar 4.6 terlihat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan sebanyak 21 provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan 10 provinsi di Wilayah Indonesia Timur tergolong pada kategori IPM menengah atas, sedangkan 2 provinsi di

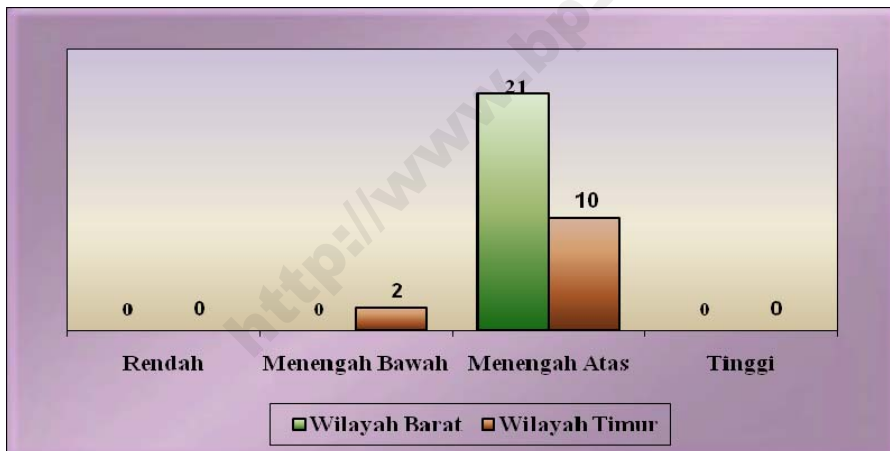


## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

Wilayah Indonesia Timur lainnya masih berada pada kategori IPM menengah bawah (50-66), yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Sebenarnya, pembangunan manusia di wilayah bagian timur telah menunjukkan suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur masih relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan Wilayah Indonesia Barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur dapat dikurangi.

**Gambar 4.6 Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, Tahun 2008**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

**Catatan:**

**Wilayah Timur meliputi :** Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua

**Wilayah Barat meliputi :** Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan

Disparitas pencapaian IPM di kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan kabupaten dan kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia di tingkat kabupaten dan kota di wilayah barat dan wilayah timur masih timpang. Di tingkat

## DISPARITAS ANTAR WILAYAH

kabupaten/kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Jakarta Selatan, yaitu sebesar 79,00. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di provinsi Papua sebesar 47,45, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Jakarta Selatan (wilayah Barat) dan Kabupaten Nduga (Wilayah Timur) sekitar 31,55 poin. Meski demikian, jika dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2007 masih ada peningkatan walaupun relatif rendah. Artinya disparitas IPM tahun 2008 berkembang ke arah kesetaraan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Hal ini juga dapat diartikan bahwa ketimpangan pembangunan sudah semakin mengecil.

**Tabel 4.6 Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, Tahun 2008**

Wilayah Barat	IPM	Wilayah Timur	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tertinggi</b>		<b>Tertinggi</b>	
Kota Jakarta Selatan	79,0	Kota Makasar	77,9
Kota Yogyakarta	78,9	Kota Ambon	77,9
Kota Jakarta Timur	78,5	Manado	77,3
Kota Jakarta Barat	78,4	Kota Pare Pare	77,0
Kota Depok	78,4	Kota Kupang	76,6
<b>Terendah</b>		<b>Terendah</b>	
Pamekasan	63,1	Lanny Jaya	48,1
Situbondo	63,1	Pegunungan Bintang	47,9
Probolinggo	61,4	Mamberamo Tengah	47,9
Bondowoso	61,3	Yalimo	47,8
Sampang	57,7	Nduga	47,5

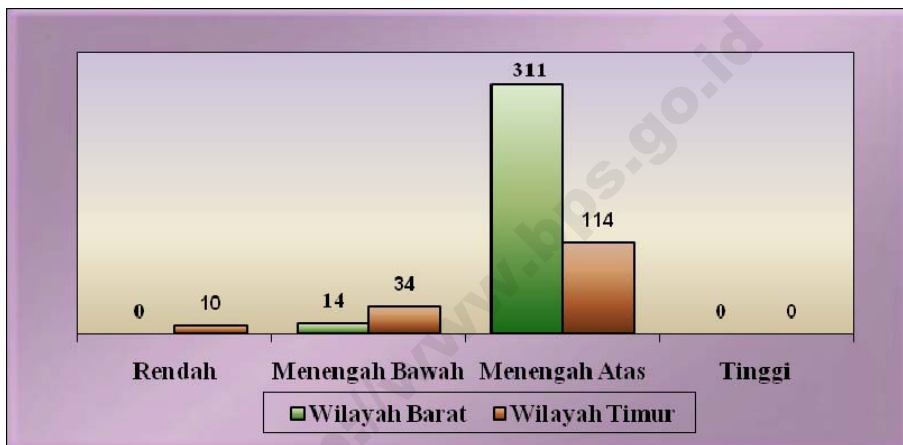
Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Menarik untuk dicermati perbedaan urutan IPM tertinggi dan terendah di masing-masing wilayah, baik di wilayah bagian barat maupun di wilayah bagian timur. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat didominasi oleh kabupaten dan kota di provinsi Jawa. Jakarta Selatan menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 79,00, kemudian urutan berikutnya berturut-turut adalah Yogyakarta (78,95), Jakarta Timur (78,54), Jakarta Barat (78,37), dan Depok (78,36). Sedangkan Kabupaten/kota dengan IPM terendah seluruhnya berada di provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda; yaitu Pamekasan (63,13), Situbondo (63,06), Probolinggo (61,44),

Bondowoso (61,26), dan Sampang (57,66). Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat.

Urutan IPM tertinggi di wilayah bagian timur Indonesia adalah berturut-turut sebagai berikut: Kota Makasar (77,9), kota Ambon (77,9), Manado (77,3), Kota Pare Pare (77,0), dan Kota Kupang (76,6). Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur lima kabupaten/kota dengan urutan IPM terendah semuanya terdapat di provinsi Papua (Tabel 4.6).

**Gambar 4.7 Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Gambar 4.7 menyajikan status pembangunan manusia kabupaten/kota menurut wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur pada tahun 2008. Dari gambar tersebut masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, ada 311 kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM menengah atas ( $66 \leq \text{IPM} < 80$ ) sedangkan di wilayah Indonesia timur hanya terdapat 144 kabupaten/kota. Pada kategori IPM menengah bawah, di wilayah Indonesia bagian barat masih ada 14 kabupaten/kota, sedangkan di wilayah

## **DISPARITAS ANTAR WILAYAH**

---

Indonesia bagian timur sebanyak 34 kabupaten/kota. Selain itu, ternyata masih terdapat 10 kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah.

<http://www.bps.go.id>

**HUBUNGAN IPM  
DENGAN INDIKATOR  
SOSIAL EKONOMI**

**5**

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pembentukannya merupakan kombinasi dari indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain indikator-indikator tersebut IPM berhubungan dengan indikator-indikator sosial ekonomi yang lain. Oleh karena itu, bab ini akan memberikan ulasan mengenai keterkaitan antara IPM dengan indikator-indikator yang lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat secara lebih teliti hubungan indikator sosial ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Bab ini terdiri dari dua sub bahasan yaitu bahasan mengenai hubungan antara IPM dengan indikator-indikator sosial ekonomi secara bivariat. Selain itu akan dibahas juga IPM dengan variabel sosial ekonomi secara bersama-sama menggunakan model regresi linear berganda.

### **5.1 Hubungan IPM dengan Indikator Lain secara Bivariat**

#### **5.1.1 Hubungan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia**

Untuk mempercepat peningkatan kapabilitas manusia di suatu wilayah diperlukan modal dan investasi yang besar. Investasi tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan capaian atas dimensi mendasar dalam pembangunan manusia. Hal tersebut terwujud dalam bentuk perbaikan status kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk. Investasi yang besar akan diperoleh melalui laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat. Selanjutnya, produk dari pembangunan manusia yang berhasil adalah terlahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupakan modal utama dalam menggerakkan dan mempercepat laju roda perekonomian.

Senada dengan uraian di atas, UNDP (Laporan Pembangunan Manusia, 1996) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia, dimana hubungan yang terjadi bersifat timbal balik. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berpengaruh terhadap pembangunan manusia, sebaliknya pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui terciptanya tenaga yang berkualitas. Namun, telah terbukti secara empiris bahwa hubungan yang terjadi tidak bersifat otomatis. Dalam lingkup global, banyak negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat tanpa diikuti dengan peningkatan

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

kinerja pembangunan manusia yang memadai. Namun sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tidak terlalu cepat tetapi mampu meningkatkan kinerja pembangunan manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memperkuat hubungan diantara keduanya melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan yang menempatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita sebagai sarana dan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir.

Pengaruh laju pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pembangunan manusia terjadi melalui beberapa jalur, yaitu melalui kegiatan rumah tangga (seperti kegiatan membesarkan anak, mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga yang sakit); melalui pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar (seperti membeli makanan, obat-obatan, dan buku sekolah); dan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah (salah satunya terlihat dari prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Sebaliknya, pembangunan manusia mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui tenaga kerja berupa SDM berkualitas, dalam arti memiliki taraf kesehatan dan pendidikan yang baik serta memiliki produktifitas yang tinggi.

Dalam publikasi ini, keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia dilihat dalam lingkup provinsi di seluruh Indonesia. Namun dari hasil analisis yang dilakukan ternyata sulit untuk dapat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat diantara keduanya sebagaimana disampaikan oleh UNDP. Hal ini tampak dari koefisien korelasi yang tidak signifikan secara statistik yaitu hanya sebesar 0,091. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa ternyata percepatan peningkatan pembangunan manusia dapat terjadi pada provinsi dengan kecepatan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif lambat. Nusa Tenggara Timur sebagai contoh, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita 2,37 persen pertahun mampu mencapai reduksi *shortfall* sebesar 7,02. Sementara Banten, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi (4,5 persen per tahun) ternyata hanya mampu mencapai nilai reduksi *shortfall* dengan besaran yang lebih rendah (2,88).

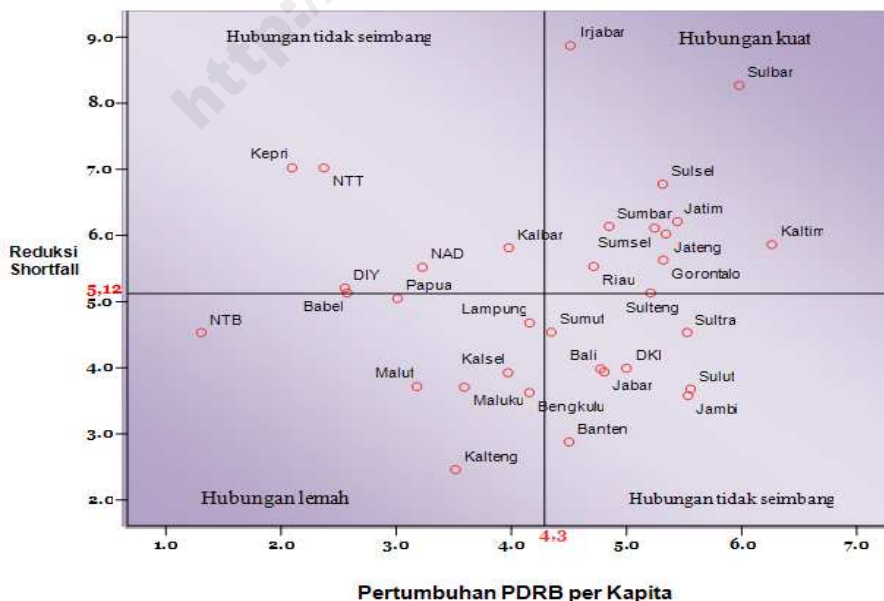
Ketidakkonsistenan tersebut diatas dapat terjadi karena **pertama**, perbedaan kemampuan masing-masing provinsi dalam mengonversikan laju pertumbuhan PDRB per kapita menjadi pembangunan manusia. **Kedua**, *series* yang ditampilkan tidak cukup panjang yaitu hanya tahun 2005 sampai dengan 2008. Sementara dalam IPM terdapat indikator sosial berupa angka harapan

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang tidak dapat meningkat dalam waktu yang singkat. **Ketiga**, umumnya IPM memiliki kecenderungan melambat peningkatannya setelah mencapai nilai yang relatif tinggi. Walaupun demikian, pembahasan mengenai keterkaitan kedua aspek tetap berharga dengan mengelompokkan seluruh provinsi kedalam beberapa kelompok.

Terkait dengan tujuan pengelompokan, UNDP mengkategorikan hubungan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia menjadi hubungan yang seimbang (*balance*), tidak seimbang (*unbalance*), kuat dan lemah. Hubungan dikatakan seimbang jika laju pertumbuhan PDRB per kapita maupun pembangunan manusia berlangsung relatif cepat (hubungan yang kuat), atau keduanya berlangsung relatif lambat (hubungan yang lemah). Sedangkan hubungan dikatakan tidak seimbang apabila laju pertumbuhan PDRB per kapita berlangsung dengan relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat, atau laju pertumbuhan PDRB per kapita relatif cepat tetapi pembangunan manusia relatif lambat. Dengan menggunakan rata-rata dari nilai seluruh provinsi sebagai *cut of point*, provinsi di Indonesia dapat dikategorikan sesuai dengan pengkategorian UNDP sebagai berikut:

**Gambar 5.1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Kapita (2005-2008) dan Reduksi *Shortfall* IPM (2005-2008)**





## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

Untuk masing-masing kategori keseimbangan pembangunan, UNDP mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dianggap penting dan disajikan secara singkat. Walaupun rekomendasi yang disajikan masih bersifat umum tetapi tampaknya cukup berharga untuk dipertimbangkan (Rekomendasi UNDP dalam Imawan dan Suhaimi, 1996:17).

1. **Hubungan yang kuat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita dan reduksi *shortfall* IPM cepat). Dalam hubungan ini antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia saling mendorong satu dengan lainnya melalui kebijakan pemerintah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif cepat dimanfaatkan untuk pembangunan manusia dan penciptaan lapangan kerja, sebaliknya pembangunan manusia yang relatif cepat memberi dampak bagi percepatan laju pertumbuhan PDRB per kapita. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk masing-masing provinsi tersebut, UNDP mengajukan beberapa saran sebagai berikut :
  - Perhatian yang lebih besar diarahkan pada pembangunan manusia termasuk insiden kemiskinan, konservasi lingkungan, dan regenerasi.
  - Untuk menjamin ada kesinambungan diupayakan agar pertumbuhan ekonomi tinggi sepenuhnya digunakan untuk pembangunan manusia.
  - Menentukan target segmen penduduk yang tidak memperoleh manfaat sepenuhnya dari pembangunan manusia secara keseluruhan seperti kelompok wanita.
2. **Hubungan yang lemah** (laju pertumbuhan PDRB per kapita dan reduksi *shortfall* IPM rendah). Dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif rendah menyebabkan pendanaan dalam investasi untuk pembangunan manusia terutama dalam pencapaian status kesehatan, gizi, dan pendidikan yang lambat penambahannya. Hal tersebut juga menyebabkan pencapaian pendapatan yang meningkat menjadi sulit dicapai. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Adapun saran UNDP bagi provinsi-provinsi tersebut adalah :

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

- Dibutuhkan upaya besar untuk menciptakan dan mempercepat laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui pembangunan manusia.
- Upaya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperbaiki distribusi pendapatan dan dengan memfokuskan pada penciptaan peluang kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- Subsidi *budget* harus disediakan bagi program-program sosial yang menjangkau rakyat banyak, bukan sekelompok elit.

### 3. Hubungan tidak seimbang

a. **Cepat-Lambat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita cepat tetapi reduksi shortfall IPM lambat). Kategori ini merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi namun kurang berhasil dalam mengonversikannya menjadi pembangunan manusia yang cepat. Namun terdapat juga dalam kategori ini provinsi yang telah memiliki capaian IPM yang tinggi sehingga kecepatan peningkatannya cenderung melambat. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Adapun saran UNDP bagi provinsi-provinsi tersebut adalah :

- Diupayakan agar distribusi sumber daya publik dan swasta lebih merata.
- Diupayakan agar pola laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih *participatory* dengan menekankan pada penciptaan lapangan kerja pada pekerjaan produktif.
- Aset-aset produktif dan pendapatan agar didistribusikan dengan menekankan pada sumber daya manusia, bukan sumber daya fisik.

b. **Lambat-Cepat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita lambat tetapi reduksi shortfall IPM cepat). Provinsi dalam kategori ini memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif cepat namun belum optimal dalam pemanfaatannya untuk mempercepat laju pertumbuhan PDRB per kapita. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Untuk masing-masing provinsi tersebut, UNDP mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- Hubungan antara pertumbuhan dan kapabilitas penduduk diperkuat.

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

- Permintaan terhadap sumber daya manusia ditingkatkan melalui investasi pada bidang-bidang produktif yang sesuai dengan komposisi keterampilan penduduk.
- Upayakan agar penduduk memiliki peluang penuh untuk memanfaatkan kapabilitas penduduk yang meningkat.

### 5.1.2 Hubungan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia

UNDP, dalam publikasi yang sama, menyatakan bahwa tujuan akhir (*ultimate end*) dari pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan manusia, sedangkan perekonomian/pertumbuhan ekonomi hanyalah sebagai alat (*a means*) untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa bangsa yang berhasil salah satunya adalah bangsa yang mampu mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusia secara efisien. Oleh karena itu, idealnya semakin tinggi pendapatan suatu bangsa maka semakin tinggi pula capaian kapabilitas manusianya. Terlebih lagi jika dengan pendapatan yang tidak terlalu tinggi, namun mampu memanfaatkannya dengan optimal untuk meningkatkan kapabilitas manusia sehingga terealisasi capaian kapabilitas manusia yang tinggi.

Dengan konteks yang sama namun dalam lingkup provinsi, kita dapat melihat seefisien apa suatu provinsi dalam mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusia dengan cara membandingkan PDRB per kapita dengan pencapaian IPM-nya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa IPM dibangun dari beberapa indikator sosial yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Indikator-indikator tersebut tidak dapat meningkat dalam waktu yang singkat. Begitu juga dengan pengaruh dari pendapatan suatu daerah terhadap capaian IPM-nya. Pengaruhnya tidak berlangsung dalam waktu yang singkat dan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing provinsi dalam mengonversikan pendapatannya menjadi capaian kapabilitas manusia yang tinggi. Capaian IPM pada tahun 2008 misalnya, nilainya tidak hanya dipengaruhi oleh PDRB per kapita pada tahun yang sama namun dipengaruhi juga oleh PDRB per kapita pada tahun-tahun sebelumnya.

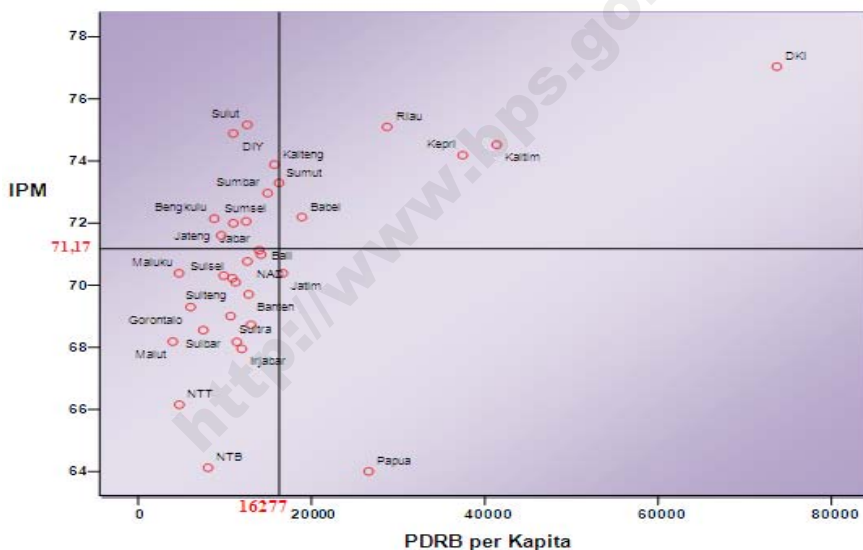
Dalam publikasi ini, dibandingkan hubungan antara PDRB per kapita tahun 2007 dan PDRB per kapita tahun 2008 terhadap IPM tahun 2008. Kemudian diketahui bahwa hubungan PDRB per kapita tahun 2008 terhadap

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

IPM tahun 2008 *lebih kuat* dibandingkan dengan hubungan PDRB per kapita tahun 2007 terhadap IPM tahun 2008. Nilai koefisien korelasi *Pearson* antara PDRB per kapita tahun 2008 terhadap IPM tahun 2008 adalah sebesar 0,519. Nilai tersebut cukup signifikan secara statistik (di atas 0,5). Sedangkan korelasi *Pearson* untuk PDRB per kapita tahun 2007 terhadap IPM tahun 2008 hanya sebesar 0,475. Selanjutnya, hubungan yang lebih kuat dianalisis lebih mendalam guna memperoleh gambaran mengenai pengaruh pendapatan suatu provinsi terhadap pencapaian kapabilitas manusianya.

Gambar berikut menyajikan hubungan antara PDRB per kapita tahun 2008 dengan pencapaian IPM tahun 2008:

**Gambar 5.2 PDRB per Kapita 2008 (ribu Rupiah) dan IPM 2008**



Pada Gambar 5.2, seluruh provinsi di Indonesia dibagi kedalam empat kategori. *Cut of point* yang digunakan untuk mengelompokan provinsi tersebut adalah angka nasional. Untuk PDRB per kapita digunakan PDB perkapita Indonesia (16,277 juta Rupiah). Dan untuk IPM digunakan IPM Indonesia (71,17) sebagai *cut of point*. Kemudian, IPM dan PDRB per kapita suatu provinsi dikatakan tinggi apabila lebih besar dari *cut of point*-nya, dan dikatakan rendah apabila lebih kecil dari *cut of point*-nya. Sehingga tinggi rendahnya IPM dan PDRB per kapita disini bersifat relatif. Selanjutnya, provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokan menjadi empat kelompok sebagai berikut:

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

- 1. PDRB per kapita dan IPM tinggi.** Dalam kategori ini antara PDRB per kapita dan IPM saling menunjang satu sama lainnya. Sumberdaya yang diperoleh dari pendapatan digunakan sebagai modal dalam proses pembangunan manusia melalui kebijakan. Sebaliknya, kualitas manusia yang baik sebagai hasil dari proses pembangunan manusia yang berhasil menjadi modal bagi pembangunan perekonomian. Provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.
- 2. PDRB per kapita dan IPM rendah.** Pada kategori ini, hubungan antara PDRB per kapita dan IPM saling melemahkan. Relatif rendahnya pendapatan suatu daerah, tentunya dapat menyebabkan rendahnya investasi yang dapat digulirkan. Termasuk investasi untuk pembangunan manusia. Sebagai akibat, peningkatan status kesehatan, pendidikan, maupun daya beli penduduk menjadi relatif sulit untuk dioptimalkan. Sebagai efek balik, kualitas manusia yang relatif rendah menjadi modal yang lemah dalam menggerakkan roda perekonomian. Provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
- 3. PDRB per kapita tinggi dan IPM rendah.** Dalam kategori ini, PDRB per kapita dan IPM berhubungan secara berkebalikan. Dalam hal ini, pendapatan yang relatif tinggi belum mampu menggerakkan IPM pada level yang tinggi pula. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran besar dalam menentukan upaya yang tepat agar hasil dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh penduduk. Sehingga dengan kemampuan ekonomi penduduk yang semakin baik secara merata diharapkan proses pembangunan manusia juga menjadi semakin baik. Adapun provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Jawa Timur dan Papua.
- 4. PDRB per kapita rendah dan IPM tinggi.** Kondisi sebaliknya (dari kategori di point 3) terjadi saat PDRB per kapita rendah namun IPM tinggi. Dalam hal ini, kualitas pembangunan manusia telah berhasil dicapai walaupun dengan kondisi pendapatan yang relatif kurang. Selanjutnya,

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

upaya menjembatani pembangunan manusia menuju kemajuan perekonomian menjadi penting. Salah satu yang bisa dilakukan adalah investasi pada bidang-bidang produktif yang sesuai dengan komposisi keterampilan penduduk. Diharapkan, permintaan terhadap sumberdaya manusia dapat ditingkatkan. Hal tersebut sebagai wujud pemberdayaan dari kualitas pembangunan manusia yang sudah relatif baik. Adapun provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.

### 5.1.3 Hubungan Persentase Penduduk Miskin dengan Pembangunan Manusia

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, sebenarnya kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup.

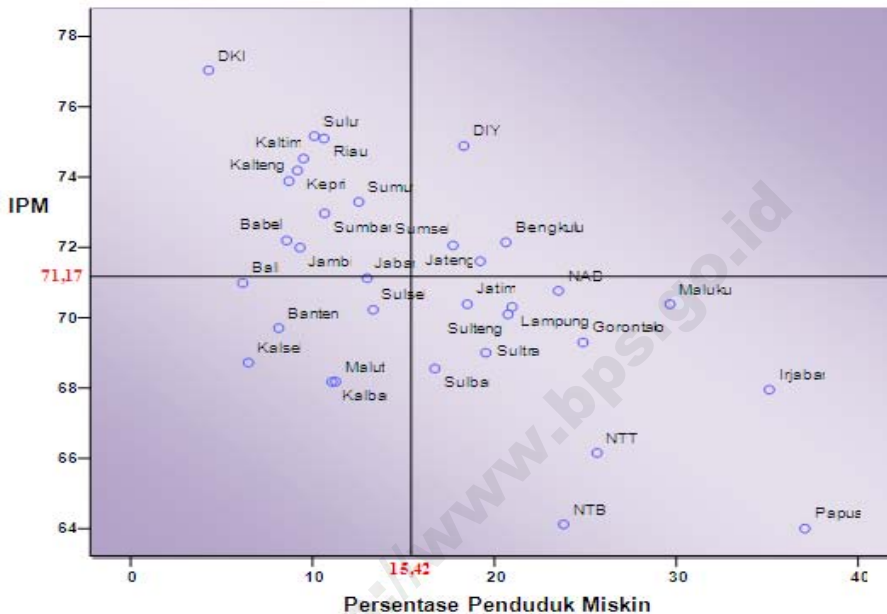
Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah.

Dalam konteks provinsi di Indonesia, diperoleh koefisien korelasi pearson sebesar -0,603 (minus) antara persentase penduduk miskin tahun 2008 dengan IPM tahun 2008. Besar dari nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara IPM dengan persentase penduduk miskin (besar ukuran korelasi lebih dari 0,5). Tanda negatif menunjukkan hubungan yang terjadi

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

bersifat berkebalikan. Dengan kata lain, tingginya IPM di suatu provinsi di Indonesia umumnya diiringi dengan persentase penduduk miskin yang rendah. Hubungan antara IPM dengan persentase penduduk miskin antar provinsi dapat dilihat melalui gambar berikut :

**Gambar 5.3 Persentase Penduduk Miskin 2008 dan IPM 2008**



Dari gambar diatas diketahui bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua (37,1 persen), Papua Barat (35,1 persen), dan Nusa Tenggara Timur (29,7 persen). Selanjutnya, dari gambar diatas juga diketahui bahwa ketiga provinsi tersebut ternyata memiliki IPM dengan nilai terendah, dengan Papua sebagai yang terendah (64,0), Nusa Tenggara Timur (66,15), kemudian Papua Barat (67,95). Sebaliknya, DKI Jakarta yang memiliki persentase penduduk miskin terendah (4,3 persen) ternyata memiliki IPM yang tertinggi (77,03). Hal tersebut menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi cenderung memiliki IPM yang rendah. Namun tentu saja ada kekecualian dalam hal ini. DI Yogyakarta sebagai contoh, menduduki peringkat 4 tertinggi dalam pencapaian IPM (74,88) namun memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (18,32 persen).

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

Selanjutnya, dengan menggunakan nilai nasional sebagai *cut of point* maka seluruh provinsi di Indonesia dapat dibagi kedalam empat kategori. Dalam hal ini persentase penduduk miskin suatu provinsi dikatakan tinggi bila lebih besar dari persentase penduduk miskin Indonesia (15,42 persen) dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Begitu juga IPM, dikatakan tinggi bila lebih besar dari IPM Indonesia (71,17) dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Sehingga pengkategorian disini bersifat relatif. Keempat kategori provinsi adalah sebagai berikut:

- 1. Persentase penduduk miskin dan IPM tinggi.** Provinsi dalam kategori ini memiliki kapabilitas manusia yang relatif baik meskipun dengan penduduk miskin yang relatif banyak. Konsentrasi lebih besar perlu diberikan untuk menekan angka kemiskinan. Hal yang mungkin dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
- 2. Persentase penduduk miskin dan IPM rendah.** Provinsi dalam kategori ini telah cukup berhasil dalam menekan angka kemiskinannya namun belum cukup berhasil dalam pencapaian kapabilitas penduduk. Upaya lebih besar perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian pembangunan manusia yaitu dengan perhatian yang lebih besar pada peningkatan kapabilitas dasar penduduk. Provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara,
- 3. Persentase penduduk miskin tinggi dan IPM rendah.** Kondisi provinsi dalam kategori ini adalah kondisi yang paling kurang. Diperlukan usaha yang lebih untuk dapat mengejar ketertinggalannya dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat capaian pembangunan manusia. Provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua,
- 4. Persentase penduduk miskin rendah dan IPM tinggi.** Kondisi provinsi dalam kategori ini adalah kondisi yang ideal. Kategori ini mampu menekan



## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

angka kemiskinan dan di saat yang sama mampu meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi. Provinsi yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

### 5.2 Keterkaitan IPM dengan Variabel Sosial Ekonomi

#### 5.2.1 Spesifikasi Model

Indeks Pembangunan Manusia berkaitan dengan indikator-indikator yang lain baik secara bersama-sama maupun sendiri. Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap Indeks Pembangunan Manusia dilakukan analisis regresi berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya IPM. Spesifikasi model untuk faktor-faktor yang mempengaruhi IPM antar provinsi adalah sebagai berikut :

$$IPM08 = C(1)*X1 + C(2)*X2 + C(3)*X3 + C(4)*X4 + C(5)*X5 + C(6)*X6 + C(7)$$

dimana :

C(7) = Intercept

C(1),C(2)...C(6) = Parameter dari masing - masing variabel yang akan diuji

IPM08 = Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008

X1,X2.....X6 = Variabel yang mempengaruhi IPM

#### 5.2.2. Hasil Regresi dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia 2008

Dari data *cross section* menurut provinsi di Indonesia diperoleh persamaan yang mencakup pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap IPM. Regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda dari data *cross section*. Secara rinci, hasil pengolahan model dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, didapat persamaan pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap IPM sebagai berikut:

$$IPM08 = 0.345* X_1 - 0.155* X_2 + 1.129* X_3 - 0.706* X_4 + 0.094* X_5 - 0.05* X_6 + 47.037$$

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

dimana:

- $X_1$  = Laju pertumbuhan ekonomi
- $X_2$  = Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
- $X_3$  = Rata-Rata Umur Kawin Pertama Wanita
- $X_4$  = Setengah Pengangguran Dengan Jam Kerja Perminggu <15jam
- $X_5$  = Persentase Desa yang Telah Menggunakan Listrik
- $X_6$  = Persentase Desa dengan jarak SMP terdekat > 10 km

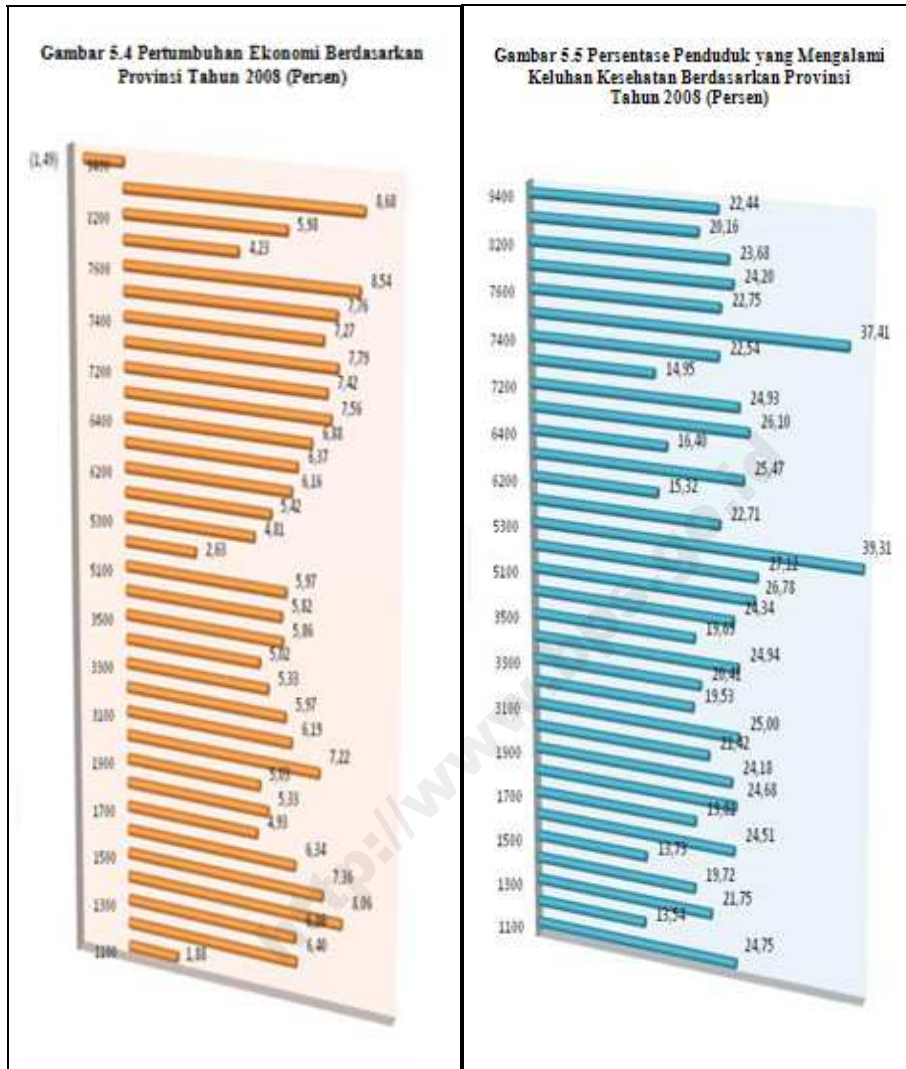
Persamaan yang terbentuk di atas mempunyai nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,84 yang berarti bahwa persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi keragaman dari nilai IPM sebesar 84 persen, sedangkan 16 persen variasi keragaman dari IPM lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk ke dalam persamaan.

Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya IPM pada tahun 2008 di setiap provinsi di Indonesia adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan ( $X_2$ ), Rata-rata Umur Kawin Pertama Wanita ( $X_3$ ), Setengah Pengangguran Dengan Jam Kerja Perminggu < 15 Jam ( $X_4$ ), Persentase Desa yang Telah Menggunakan Listrik ( $X_5$ ), dan Persentase Desa dengan Jarak SMP Terdekat > 10 km ( $X_6$ ).

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dari indikator ekonomi, maka variabel “Laju Pertumbuhan Ekonomi” berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi menyebabkan semakin tinggi pula IPM di provinsi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi naik sebesar 1 persen menyebabkan IPM di provinsi tersebut naik sebesar 0,345 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Dari Gambar 5.4 dapat dilihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi non migas antar provinsi. Pada tahun 2008, provinsi Papua Barat merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,68 persen, sedangkan daerah yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2008 adalah provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar -1,49 persen.

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI



Sumber : PDRB tahun 2008

Sumber : PODES 2008

Sedangkan variabel “Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan” berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan di suatu provinsi menyebabkan IPM di provinsi tersebut justru akan semakin rendah. Angka keluhan kesehatan cenderung tinggi di beberapa provinsi yang nilai IPM-nya rendah. Hal ini sesuai dengan pengaruh negatif

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

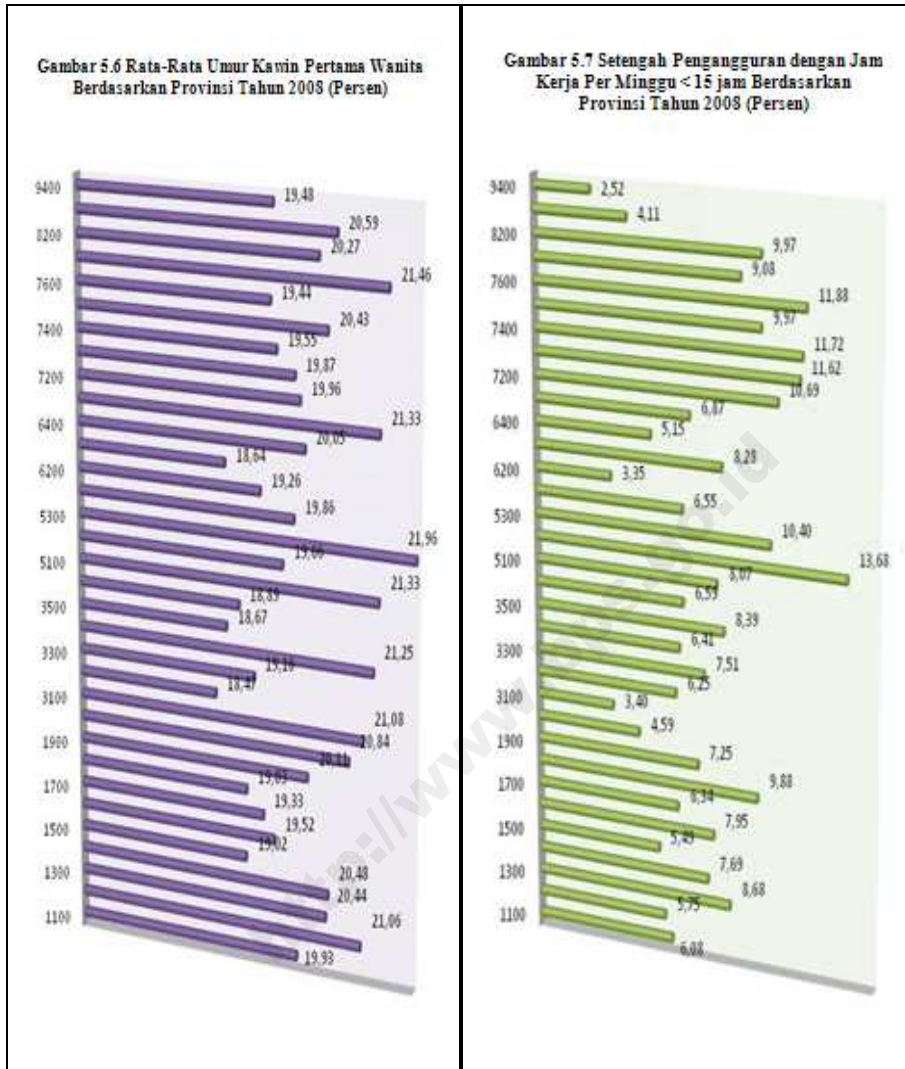
---

angka keluhan kesehatan terhadap angka harapan hidup disuatu wilayah. Artinya semakin tinggi angka keluhan kesehatan maka akan mengurangi angka harapan hidup sehingga mengakibatkan penurunan IPM suatu daerah.

Dari Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa daerah-daerah yang angka keluhan kesehatannya tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (39,31 persen) dan Gorontalo (37,41 persen), sedangkan provinsi yang mengalami keluhan kesehatan paling rendah adalah Sumatera Utara (13,54 persen).

“Rata-rata Umur Kawin Pertama Wanita” mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai IPM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi rata-rata umur kawin pertama wanita di suatu provinsi menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut semakin tinggi. Berdasarkan persamaan yang terbentuk di atas, variabel ini mempunyai pengaruh positif paling besar terhadap nilai IPM, yaitu setiap kenaikan rata-rata umur kawin pertama wanita di suatu provinsi sebesar 1 tahun menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut naik sebesar 1,12. Hal ini terkait dengan masa reproduksi wanita. Perempuan yang melahirkan pada usia muda (kurang dari 20 tahun) mempunyai resiko yang lebih besar untuk mengalami masalah kehamilan dan kematian selama melahirkan. Selain itu, angka kematian bayi pada kelompok umur ini juga relatif lebih tinggi. Hal ini berhubungan langsung dengan angka harapan hidup saat lahir yang merupakan salah satu komponen IPM.

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI



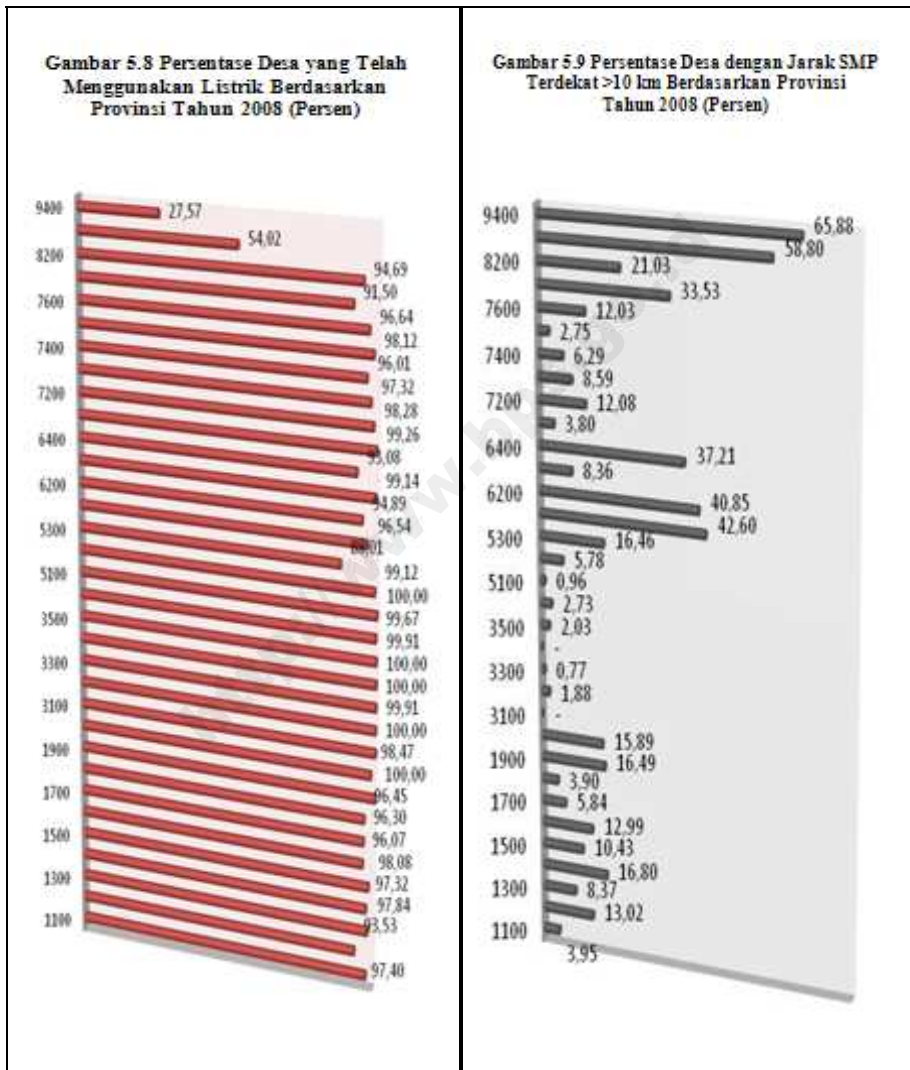
Sumber : Susenas 2008

Sumber : Sakernas 2008

Dari sisi ketenagakerjaan tercatat variabel “Setengah Pengangguran Dengan Jam Kerja Perminggu < 15 Jam” yang berpengaruh positif terhadap nilai IPM. Semakin tinggi penduduk berstatus setengah pengangguran dengan jam kerja perminggu kurang dari 15 jam di suatu provinsi menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut semakin rendah. Berdasarkan persamaan yang terbentuk di

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

atas, diketahui bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif paling besar terhadap nilai IPM di suatu provinsi, yaitu setiap kenaikan persentase penduduk yang berstatus setengah pengangguran dengan jam kerja perminggu kurang dari 15 jam menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut turun sebesar 0,705 dengan asumsi variabel lainnya konstan.



Sumber : PODES 2008

Sumber : PODES 2008

## HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

---

Ketersediaan infrastruktur listrik dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di suatu provinsi terlihat dari variabel “Persentase Desa yang Telah Menggunakan Listrik” yang mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPM di suatu provinsi. Artinya semakin tinggi persentase desa yang telah menggunakan listrik di suatu provinsi menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut semakin tinggi, karena peranan listrik sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena dengan adanya listrik pada kemudahan akses dalam hal pendidikan, kesehatan dan arus informasi.

Fasilitas listrik antar provinsi tidak jauh berbeda, rata-rata cakupan layanan listrik 90 persen, terendah di provinsi Papua (27,57 persen) dan Papua Barat (54,02 persen). Secara detail cakupan layanan listrik dapat dilihat pada Gambar 5.8.

Demikian juga dengan infrastruktur pendidikan, seperti variabel “Persentase Desa dengan Jarak SMP Terdekat > 10 km” mempunyai pengaruh yang negatif. Artinya semakin tinggi persentase desa dengan jarak SMP terdekat lebih dari 10 km di suatu provinsi menyebabkan nilai IPM di provinsi tersebut semakin rendah. Hal ini menunjukkan kuantitas SMP di beberapa provinsi masih sangat perlu ditingkatkan agar peningkatan angka IPM terutama rata-rata lama sekolah dapat meningkat. Provinsi yang berada di pulau Kalimantan dan Papua merupakan daerah yang kondisi SMP terdekat lebih dari 10 km paling besar. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang paling besar proporsi jumlah SMP terdekat lebih dari 10 km masing-masing mencapai 65,88 persen dan 58,80.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Brata, Aloysius Gunadi. 2009. *Analisis Hubungan Timbal Balik antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. [www.menapakihidup.wordpress.com](http://www.menapakihidup.wordpress.com) diakses pada November 2009.
- Hinde, Andrew, 1998. *Demographic Method*, Arnold, London.
- Human Development Report, 1993. New York. USA.
- Human Development Report, 1996. New York. USA.
- Human Development Report, 1997. New York. USA.
- Human Development Report, 2000. New York. USA.
- Human Development Index , 2005. New York. USA.
- H. Preston, Samuel, et.all, 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- Imawan, Wynandin dan Uzair Suhaimi. 1997. *Status dan Perkembangan Upaya Pembangunan Manusia di Indonesia: Perbandingan Antar Propinsi*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Meneg PP dan BPS. 2008. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*. Jakarta.
- Ritonga, Razali, 2006. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kompas 20 Desember 2006. Opini halaman 4.
- Siegel, Jacob, 2002. *Applied Demographic*, Academic Press, USA.
- UNDP, BPS dan Bappenas 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 2001:Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*, BPS–Indonesia.
- [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses pada November 2009.



## TIM PENULIS

Pengarah : Wiwiek Arumwaty

Editor : Margo Yuwono  
Harmawanti Marhaeni

Penulis : Bambang Tribudi  
Ardi ADJI  
Yuni Suci Kurniawati  
Ari Shobri Bukhari

Pengolah Data : Ari Shobri Bukhari  
Henri Asri Reagan  
Ardi ADJI  
Yuni Suci Kurniawati

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

### Lampiran 1. Hasil Regresi *Cross Data* Indonesia Per Provinsi

Dependent Variable: IPM08

Method: Least Squares

Sample: 1 33

Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.345248	0.140219	2.462199	0.0208
X2	-0.154601	0.056294	-2.746324	0.0108
X3	1.128604	0.294603	3.830939	0.0007
X4	-0.705642	0.107163	-6.584768	0.0000
X5	0.094099	0.029860	3.151295	0.0041
X6	-0.049761	0.024341	-2.044367	0.0512
C	47.03675	5.973137	7.874715	0.0000
R-squared	0.842358	Mean dependent var		70.82265
Adjusted R-squared	0.805980	S.D. dependent var		3.041268
S.E. of regression	1.339610	Akaike info criterion		3.608465
Sum squared resid	46.65842	Schwarz criterion		3.925906
Log likelihood	-52.53968	F-statistic		23.15519
Durbin-Watson stat	1.870210	Prob(F-statistic)		0.000000

*Sumber : Hasil run eviews*

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1100	NAD	68,40	68,50	96,20	96,20	8,50	8,50	600,95	605,56	70,35	70,76	17	17	1,39
1101	Simeulue	62,75	62,84	98,30	98,30	7,60	8,00	613,41	617,07	67,97	68,60	327	338	1,96
1102	Aceh Singkil	64,27	64,46	96,20	96,20	7,70	7,70	607,59	608,18	67,97	68,12	326	353	0,46
1103	Aceh Selatan	66,61	66,71	96,42	96,42	8,20	8,20	596,92	600,21	68,87	69,18	289	306	1,00
1104	Aceh Tenggara	69,11	69,16	96,94	96,94	9,30	9,30	593,99	594,03	70,96	70,99	190	211	0,12
1105	Aceh Timur	69,41	69,52	97,24	97,35	8,40	8,40	579,33	580,16	69,40	69,55	250	289	0,49
1106	Aceh Tengah	69,31	69,42	97,47	98,08	9,27	9,29	606,22	612,61	72,11	72,81	137	130	2,50
1107	Aceh Barat	69,69	69,78	94,06	94,06	8,20	8,20	586,91	591,18	69,28	69,66	260	281	1,24
1108	Aceh Besar	70,42	70,52	96,93	96,93	9,48	9,48	605,60	606,50	72,71	72,84	111	129	0,47
1109	Pidie	68,94	69,11	94,53	95,51	8,60	8,60	606,32	608,11	70,76	71,21	193	202	1,54
1110	Bireuen	72,22	72,28	98,34	98,34	9,20	9,20	587,78	589,40	72,45	72,60	122	138	0,58
1111	Aceh Utara	69,41	69,52	96,04	96,04	9,10	9,10	601,82	602,19	71,39	71,47	176	192	0,31
1112	Aceh Barat Daya	66,30	66,49	95,70	96,22	7,50	7,50	601,49	611,73	68,37	69,38	309	299	3,20
1113	Gayo Lues	66,73	66,84	86,70	86,70	8,70	8,70	596,10	596,44	67,08	67,17	367	392	0,27
1114	Aceh Tamiang	68,09	68,18	98,00	98,00	8,40	8,40	583,72	591,29	69,17	69,81	272	267	2,06
1115	Nagan Raya	69,31	69,42	89,70	89,70	7,32	7,32	589,38	599,28	67,64	68,47	340	342	2,54
1116	Aceh Jaya	67,84	67,91	91,78	93,73	8,70	8,70	588,36	591,47	68,23	68,94	316	318	2,24
1117	Bener Meriah	67,31	67,41	97,19	97,19	8,49	8,49	587,03	597,84	68,88	69,77	288	272	2,86
1118	Pidie Jaya	68,91	69,02	94,20	94,20	8,00	8,00	602,87	618,56	69,96	71,23	229	201	4,22
1171	Kota Banda Aceh	69,99	70,24	99,03	99,03	11,86	11,86	626,44	630,25	76,31	76,74	24	25	1,82
1172	Kota Sabang	70,10	70,36	98,26	98,78	10,13	10,23	620,65	623,14	74,48	75,00	60	62	2,03
1173	Kota Langsa	69,96	70,14	98,75	98,75	9,70	9,88	595,18	599,51	72,22	72,79	129	133	2,04
1174	Kota Lhokseumawe	69,70	70,00	98,82	98,82	9,70	9,70	628,30	630,77	74,65	75,00	56	61	1,41
1175	Subulussalam	65,40	65,54	96,50	96,50	7,50	7,50	604,56	605,35	68,28	68,42	312	343	0,45

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1200	SUMATERA UTARA	69,10	69,20	97,03	97,08	8,60	8,60	624,12	629,97	72,78	73,29	8	8	1,90
1201	Nias	68,98	69,15	89,45	89,45	6,40	6,40	593,94	598,85	67,07	67,55	368	383	1,44
1202	Mandailing Natal	63,43	63,46	99,31	99,31	7,70	7,70	624,66	629,74	69,51	69,92	245	261	1,34
1203	Tapanuli Selatan	66,93	66,99	99,74	99,76	8,90	8,90	631,41	635,81	72,96	73,33	99	107	1,38
1204	Tapanuli Tengah	67,56	67,71	95,60	95,74	8,10	8,10	608,30	612,93	70,01	70,48	223	236	1,57
1205	Tapanuli Utara	68,64	68,95	98,55	98,55	8,80	8,80	623,94	628,68	72,99	73,53	94	94	1,98
1206	Toba Samosir	70,52	70,54	97,92	98,15	9,70	9,70	633,83	638,57	75,33	75,75	41	44	1,72
1207	Labuhan Batu	68,16	68,66	98,37	97,92	8,30	8,30	626,80	631,57	72,54	73,08	116	117	1,99
1208	Asahan	68,59	68,69	96,55	96,68	7,37	7,37	620,00	624,23	71,16	71,57	184	188	1,43
1209	Simalungun	68,67	68,73	97,31	97,31	8,60	8,60	618,08	622,20	72,13	72,49	135	145	1,27
1210	Dairi	67,70	67,90	97,81	97,81	8,20	8,33	619,08	623,18	71,49	72,01	166	166	1,84
1211	Karo	71,85	71,99	98,59	98,59	8,90	8,90	612,92	617,30	74,01	74,43	71	75	1,60
1212	Deli Serdang	69,83	70,07	97,93	98,18	9,02	9,09	624,90	629,69	73,76	74,36	79	78	2,31
1213	Langkat	68,92	68,99	96,81	96,81	8,70	8,70	612,75	617,56	71,83	72,24	147	149	1,46
1214	Nias Selatan	68,85	69,20	84,80	84,80	6,30	6,30	583,10	587,42	65,06	65,59	415	433	1,51
1215	Humbang Hasundutan	67,64	67,69	98,20	98,20	8,65	8,74	604,99	609,62	70,79	71,24	192	200	1,53
1216	Pakpak Barat	66,81	67,05	96,50	96,50	8,10	8,10	603,99	608,63	69,47	69,95	246	259	1,59
1217	Samosir	69,46	69,52	96,60	96,60	9,50	9,50	615,35	619,65	72,87	73,24	102	112	1,34
1218	Serdang Bedagai	68,76	68,79	97,39	97,39	8,60	8,60	618,04	622,90	72,20	72,59	131	140	1,42
1219	Batu Bara	68,18	68,34	95,20	95,20	7,20	7,24	620,56	624,64	70,55	70,98	201	212	1,46
1220	Padang Lawas Utara	-	66,48	-	99,01	-	7,99	-	631,11	-	71,85	-	176	-
1221	Padang Lawas	-	66,90	-	99,64	-	7,72	-	619,75	-	71,15	-	204	-
1222	Labuhan Batu Selatan	-	69,28	-	98,81	-	7,97	-	628,66	-	73,16	-	115	-
1223	Labuhan Batu Utara	-	68,82	-	98,15	-	7,80	-	630,79	-	72,80	-	132	-
1271	Kota Sibolga	70,09	70,11	99,20	99,20	9,50	9,61	616,94	621,67	73,93	74,39	72	77	1,77
1272	Kota Tanjung Balai	69,35	69,66	98,97	98,97	8,60	8,60	616,97	620,68	72,80	73,26	105	111	1,68
1273	Kota Pematang Siantar	71,72	71,83	99,39	99,39	10,80	10,80	625,90	630,64	76,52	76,95	21	22	1,82
1274	Kota Tebing Tinggi	70,98	71,07	98,53	98,53	9,80	9,80	626,96	631,85	75,27	75,69	45	47	1,72

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1275	Kota Medan	71,36	71,50	99,29	99,29	10,70	10,70	625,86	631,05	76,22	76,70	26	26	2,02
1276	Kota Binjai	71,47	71,54	99,17	99,17	9,84	9,84	624,44	628,70	75,51	75,88	37	41	1,49
1277	Kota Padang Sidempuan	69,18	69,35	99,60	99,60	9,80	9,80	617,73	622,58	73,79	74,26	77	83	1,77
<b>1300</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>68,80</b>	<b>69,00</b>	<b>96,10</b>	<b>96,66</b>	<b>8,18</b>	<b>8,26</b>	<b>625,93</b>	<b>631,52</b>	<b>72,23</b>	<b>72,96</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2,62</b>
1301	Kepulauan Mentawai	68,24	68,28	92,37	92,37	6,50	6,50	598,26	601,23	67,72	67,97	338	360	0,76
1302	Pesisir Selatan	66,54	66,75	92,57	92,83	7,50	7,53	623,82	628,40	69,52	70,07	243	253	1,81
1303	Solok	65,65	65,90	97,10	97,10	7,30	7,30	616,11	621,05	69,29	69,81	258	266	1,69
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	65,99	66,25	93,07	93,07	7,20	7,20	625,77	630,49	69,26	69,77	263	271	1,66
1305	Tanah Datar	69,94	70,22	96,53	96,63	7,80	7,80	622,78	627,58	72,44	72,98	123	119	1,99
1306	Padang Pariaman	67,63	67,92	94,45	94,45	7,13	7,13	621,35	626,29	70,09	70,63	220	228	1,82
1307	Agam	68,56	68,67	97,82	97,82	8,20	8,20	620,23	625,22	72,06	72,50	139	144	1,60
1308	Limapuluh Koto	67,42	67,72	98,14	98,70	7,30	7,70	603,22	607,97	69,52	70,47	244	238	3,11
1309	Pasaman	66,50	66,76	98,36	98,36	7,40	7,57	628,19	633,12	71,05	71,71	186	186	2,26
1310	Solok Selatan	64,32	64,35	97,21	97,24	7,40	7,57	601,62	606,35	67,54	68,06	347	354	1,60
1311	Dharmas Raya	65,31	65,50	95,54	95,54	7,34	7,37	599,15	604,04	67,48	67,99	350	359	1,55
1312	Pasaman Barat	64,42	64,62	97,83	97,83	7,90	7,90	611,21	616,14	68,84	69,33	291	302	1,58
1371	Kota Padang	70,21	70,39	99,48	99,48	10,80	10,80	638,85	643,92	76,70	77,20	14	16	2,11
1372	Kota Solok	69,23	69,34	98,50	98,50	9,80	9,80	626,93	631,99	74,28	74,73	67	68	1,76
1373	Kota Sawah Lunto	70,96	71,22	97,87	98,43	8,74	8,77	619,42	622,71	73,74	74,29	80	81	2,08
1374	Kota Padang Panjang	70,32	70,60	99,28	99,28	10,20	10,20	640,28	645,38	76,39	76,93	23	23	2,32
1375	Kota Bukit Tinggi	71,12	71,22	99,49	99,49	10,43	10,43	641,33	646,58	77,13	77,59	10	10	2,00
1376	Kota Payakumbuh	70,21	70,31	98,60	99,16	9,04	9,07	627,95	633,02	74,36	74,95	65	63	2,30
1377	Kota Pariaman	68,15	68,56	98,24	98,24	9,30	9,33	621,33	625,98	72,82	73,43	104	100	2,23
<b>1400</b>	<b>RIAU</b>	<b>71,00</b>	<b>71,10</b>	<b>97,80</b>	<b>97,81</b>	<b>8,40</b>	<b>8,51</b>	<b>634,11</b>	<b>638,31</b>	<b>74,63</b>	<b>75,09</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,82</b>
1401	Kuantan Sengingi	68,05	68,11	97,80	97,80	7,80	7,80	633,10	638,90	72,47	72,95	119	122	1,75
1402	Indragiri Hulu	68,55	68,60	97,63	97,67	7,72	7,72	637,20	642,79	72,96	73,43	98	98	1,74

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1403	Indragiri Hilir	70,70	70,89	98,52	98,52	7,60	7,60	632,04	637,73	73,87	74,41	75	76	2,08
1404	Pelalawan	68,48	68,56	97,60	97,60	7,67	7,93	618,38	623,66	71,43	72,07	171	161	2,25
1405	Siak	71,23	71,34	98,21	98,21	8,80	8,80	634,19	639,78	75,15	75,64	46	51	1,99
1406	Kampar	68,10	68,21	98,10	98,10	8,23	8,44	634,43	640,15	72,98	73,64	95	93	2,42
1407	Rokan Hulu	67,08	67,09	97,38	97,38	7,50	7,50	630,72	636,08	71,43	71,84	172	178	1,46
1408	Bengkalis	70,06	70,13	97,29	97,78	8,60	8,86	623,99	629,49	73,36	74,12	85	85	2,85
1409	Rokan Hilir	67,01	67,04	97,37	97,37	7,20	7,20	629,32	634,96	71,06	71,51	185	190	1,55
1471	Kota Pekanbaru	70,87	71,03	99,77	99,77	11,30	11,30	632,08	638,13	76,98	77,54	11	11	2,41
1473	Kota Dumai	70,77	71,02	99,28	99,28	9,70	9,70	640,87	646,88	76,31	76,91	25	24	2,54
<b>1500</b>	<b>JAMBI</b>	<b>68,60</b>	<b>68,80</b>	<b>96,00</b>	<b>96,05</b>	<b>7,63</b>	<b>7,63</b>	<b>622,99</b>	<b>628,25</b>	<b>71,46</b>	<b>71,99</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1,85</b>
1501	Kerinci	70,40	70,56	97,22	97,22	8,10	8,10	625,10	629,91	73,25	73,71	89	92	1,72
1502	Merangin	67,61	67,95	96,90	97,38	7,45	7,45	619,70	624,52	70,73	71,39	195	196	2,28
1503	Sarolangun	68,93	69,12	93,70	93,70	6,90	6,90	624,80	631,59	70,74	71,36	194	197	2,14
1504	Batanghari	68,49	68,73	97,56	97,56	7,51	7,51	625,20	630,33	71,83	72,36	146	147	1,89
1505	Muara Jambi	69,11	69,13	95,89	95,89	7,53	7,53	622,20	627,30	71,59	71,99	160	169	1,43
1506	Tanjung Jabung Timur	69,33	69,71	92,40	92,40	6,20	6,20	625,80	628,06	70,23	70,61	213	230	1,29
1507	Tanjung Jabung Barat	69,07	69,30	97,90	97,90	7,50	7,50	615,10	619,75	71,44	71,93	169	172	1,70
1508	Tebo	68,70	68,86	94,90	94,90	6,80	6,80	625,00	627,26	70,81	71,08	191	207	0,90
1509	Bungo	66,37	66,68	96,10	96,10	7,59	7,59	620,10	626,59	70,00	70,67	224	223	2,24
1571	Kota Jambi	69,77	69,78	98,76	98,76	10,10	10,10	629,60	634,75	75,07	75,47	49	53	1,63
1572	Kota Sungai Penuh	-	70,84	-	97,22	-	9,10	-	651,70	-	76,29	-	32	-
<b>1600</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>69,00</b>	<b>69,20</b>	<b>96,66</b>	<b>97,05</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>617,59</b>	<b>623,49</b>	<b>71,40</b>	<b>72,05</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2,28</b>
1601	Ogan Komering Ulu	69,10	69,20	97,68	98,07	7,57	7,57	614,32	619,18	71,40	71,92	175	173	1,82
1602	Ogan Komering Hilir	67,33	67,56	94,65	94,75	6,70	6,70	614,97	619,41	69,15	69,64	274	283	1,59
1603	Muara Enim (Liot)	67,09	67,28	98,80	98,80	7,30	7,30	602,42	607,44	69,42	69,91	249	262	1,61
1604	Lahat	67,24	67,56	97,20	97,55	7,59	7,59	602,32	607,32	69,35	69,99	254	257	2,10

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1605	Musi Rawas	64,14	64,29	96,50	96,50	7,00	7,00	592,80	597,77	66,31	66,77	387	405	1,38
1606	Musi Banyuasin	69,07	69,33	95,90	96,29	6,80	7,00	604,22	610,91	69,64	70,54	239	232	2,95
1607	Banyuasin	66,88	67,05	95,93	96,08	7,00	7,00	604,41	609,02	68,60	69,08	298	308	1,55
1608	Ogan Komiring Ulu Selatan	69,16	69,24	97,49	97,49	7,10	7,10	604,40	608,79	70,28	70,66	209	224	1,28
1609	Ogan Komiring Ulu Timur	68,16	68,23	94,63	94,63	6,80	6,80	594,94	604,07	68,14	68,88	319	322	2,33
1610	Ogan Ilir	65,40	65,68	97,24	97,32	7,36	7,46	602,32	605,49	68,17	68,67	317	335	1,55
1611	Empat Lawang	65,14	65,28	96,75	97,02	6,88	6,88	597,30	602,06	67,17	67,68	362	379	1,54
1671	Kota Palembang	70,43	70,66	98,63	98,63	9,90	9,90	625,44	630,94	74,94	75,49	50	52	2,20
1672	Kota Prabumulih	70,71	71,10	97,90	98,29	8,88	8,88	603,81	608,80	72,51	73,20	117	114	2,50
1673	Kota Pagar Alam	69,52	69,74	97,82	98,21	8,42	8,42	606,52	609,92	71,70	72,16	148	153	1,66
1674	Kota Lubuk Linggau	65,24	65,39	98,03	98,03	8,98	8,98	599,50	604,26	69,24	69,69	265	276	1,46
<b>1700</b>	<b>BENGKULU</b>	<b>69,20</b>	<b>69,40</b>	<b>94,69</b>	<b>94,87</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>620,29</b>	<b>625,66</b>	<b>71,57</b>	<b>72,14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1,99</b>
1701	Bengkulu Selatan	67,00	67,10	94,70	95,40	7,87	7,87	622,64	627,52	70,44	71,03	205	208	2,00
1702	Rejang Lebong	66,22	66,52	94,80	94,80	7,60	7,60	616,50	621,12	69,35	69,88	253	263	1,72
1703	Bengkulu Utara	69,03	69,17	91,60	91,02	7,10	7,18	620,78	626,76	70,16	70,63	216	227	1,56
1704	Kaur	66,36	66,61	94,30	95,00	7,50	7,50	600,18	604,60	67,99	68,63	324	337	1,99
1705	Seluma	65,00	65,20	93,80	93,80	7,30	7,30	583,07	587,45	65,66	66,11	402	420	1,31
1706	Mukomuko	67,40	67,50	93,43	93,43	7,00	7,00	615,67	620,42	69,19	69,62	271	286	1,38
1707	Lebong	65,55	65,87	94,49	95,19	7,47	7,47	610,88	615,56	68,38	69,08	307	309	2,20
1708	Kepahiang	63,37	63,63	95,35	95,84	7,16	7,16	600,78	605,81	66,36	67,00	385	400	1,91
1709	Bengkulu Tengah	-	70,02	-	91,80	-	6,64	-	587,55	-	67,86	-	366	-
1771	Bengkulu	70,09	70,19	99,06	99,06	10,73	10,73	640,43	644,89	76,61	77,01	17	19	1,71
<b>1800</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>68,80</b>	<b>69,00</b>	<b>93,47</b>	<b>93,63</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>610,09</b>	<b>615,03</b>	<b>69,78</b>	<b>70,30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1,74</b>
1801	Lampung Barat	66,26	66,52	95,75	95,75	7,17	7,17	596,65	600,87	67,74	68,21	335	349	1,45
1802	Tanggamus	68,16	68,51	94,27	94,27	6,96	6,96	613,60	618,53	69,62	70,19	241	247	1,88



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1803	Lampung Selatan	67,78	67,97	93,42	93,42	6,80	6,75	604,43	608,72	68,39	68,79	306	327	1,25
1804	Lampung Timur	69,65	69,81	92,40	92,40	6,90	6,90	603,81	608,47	69,23	69,68	266	277	1,45
1805	Lampung Tengah	68,81	68,92	91,67	92,17	7,20	7,20	611,24	615,84	69,40	69,93	251	260	1,73
1806	Lampung Utara	67,36	67,52	95,23	95,23	7,50	7,50	602,99	607,48	68,97	69,40	284	296	1,41
1807	Way Kanan	68,93	69,07	94,10	94,60	6,50	6,50	597,94	602,25	68,46	68,98	304	315	1,65
1808	Tulang Bawang	68,11	68,33	93,20	93,20	6,60	6,60	607,72	612,77	68,63	69,14	297	307	1,62
1809	Pesawaran	-	68,20	-	93,20	-	6,87	-	605,69	-	68,73	-	330	-
1871	Kota Bandar Lampung	69,82	70,13	97,86	97,86	9,89	9,89	623,75	628,95	74,29	74,86	66	65	2,22
1872	Kota Metro	72,11	72,22	97,26	97,26	9,80	9,80	623,06	627,53	75,31	75,71	43	46	1,65
<b>1900</b>	<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>68,50</b>	<b>68,60</b>	<b>95,40</b>	<b>95,57</b>	<b>7,18</b>	<b>7,37</b>	<b>631,75</b>	<b>636,07</b>	<b>71,62</b>	<b>72,19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2,01</b>
1901	Bangka	66,99	67,22	96,13	96,14	7,24	7,41	635,10	639,55	71,24	71,84	179	179	2,08
1902	Belitung	68,97	68,99	96,25	96,39	7,78	7,78	627,60	632,25	72,19	72,59	132	141	1,44
1903	Bangka Barat	67,53	67,54	92,12	92,59	6,67	6,67	619,90	624,21	69,06	69,50	280	293	1,43
1904	Bangka Tengah	67,64	67,66	95,71	95,79	6,73	6,73	624,80	628,71	70,34	70,68	208	222	1,12
1905	Bangka Selatan	67,22	67,31	92,54	92,55	5,90	5,92	586,20	590,09	65,82	66,18	399	416	1,06
1906	Belitung Timur	67,99	68,36	96,46	96,62	7,45	7,45	616,30	620,89	70,58	71,18	200	203	2,04
1971	Kota Pangkal Pinang	70,18	70,22	97,68	98,15	8,90	9,07	634,60	639,10	74,55	75,15	58	58	2,35
<b>2100</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>69,60</b>	<b>69,70</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>8,94</b>	<b>8,94</b>	<b>631,94</b>	<b>637,67</b>	<b>73,68</b>	<b>74,18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1,89</b>
2101	Karimun	69,76	69,81	95,00	95,00	7,80	7,80	628,00	632,90	72,40	72,80	124	131	1,46
2102	Kepulauan Riau	69,57	69,61	94,40	94,40	7,95	7,95	637,00	641,60	72,97	73,34	97	105	1,38
2103	Natuna	67,96	68,10	95,75	95,75	6,90	6,90	608,00	612,75	69,36	69,81	252	268	1,46
2104	Lingga	69,70	69,88	90,90	90,90	7,20	7,20	618,10	623,18	70,25	70,74	212	220	1,66
2105	Kepulauan Anambas	-	67,07	-	89,72	-	5,25	-	622,75	-	67,44	-	387	-
2171	Kota Batam	70,62	70,70	98,84	98,84	10,70	10,70	640,20	645,52	76,82	77,28	12	14	1,97
2172	Kota Tanjung Pinang	69,40	69,51	97,30	97,30	9,20	9,20	624,20	629,50	73,46	73,92	84	88	1,76

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>3100</b>	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>72,80</b>	<b>72,90</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>620,78</b>	<b>625,70</b>	<b>76,59</b>	<b>77,03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,86</b>
3101	Kep. Seribu	70,26	70,32	97,25	97,25	7,80	7,80	583,69	588,04	69,76	70,14	233	250	1,23
3171	Kota Jakarta Selatan	73,03	73,15	98,94	98,94	11,00	11,00	641,94	647,03	78,54	79,00	1	1	2,14
3172	Kota Jakarta Timur	72,84	72,97	98,97	98,97	11,00	11,00	637,48	642,29	78,09	78,54	3	3	2,03
3173	Kota Jakarta Pusat	71,97	72,05	99,28	99,28	10,60	10,60	639,09	644,22	77,51	77,95	6	6	1,95
3174	Kota Jakarta Barat	73,02	73,13	98,47	98,47	10,70	10,70	638,40	643,36	77,93	78,37	4	4	2,01
3175	Kota Jakarta Utara	72,48	72,56	98,39	98,39	9,90	9,90	632,85	637,69	76,59	77,01	18	20	1,79
<b>3200</b>	<b>JAWA BARAT</b>	<b>67,60</b>	<b>67,80</b>	<b>95,32</b>	<b>95,53</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>623,64</b>	<b>626,81</b>	<b>70,71</b>	<b>71,12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1,38</b>
3201	Bogor	67,63	68,03	93,59	93,59	7,20	7,20	623,09	627,74	70,08	70,66	221	225	1,93
3202	Sukabumi	66,12	66,43	96,59	96,59	6,39	6,39	621,82	625,50	69,21	69,66	270	279	1,47
3203	Cianjur	64,96	65,29	97,09	97,21	6,40	6,42	608,41	612,10	67,65	68,17	339	351	1,59
3204	Bandung	68,78	68,86	98,37	98,59	8,20	8,20	628,90	633,46	72,97	73,41	96	101	1,65
3205	Garut	64,42	64,80	98,89	98,89	7,10	7,10	630,72	634,95	69,99	70,52	225	233	1,79
3206	Tasikmalaya	67,32	67,53	98,81	98,81	6,80	6,80	629,09	629,09	71,24	71,35	180	198	0,40
3207	Ciamis	66,77	66,94	96,68	96,68	6,90	6,90	624,01	628,34	70,14	70,57	217	231	1,43
3208	Kuningan	67,12	67,23	93,64	93,86	6,80	6,80	625,50	629,46	69,70	70,12	236	251	1,39
3209	Cirebon	64,92	65,05	90,66	90,66	6,42	6,42	622,52	626,82	67,30	67,70	356	378	1,23
3210	Majalengka	65,57	65,82	94,81	94,81	6,70	6,70	624,49	628,61	68,94	69,40	285	297	1,48
3211	Sumedang	67,10	67,21	97,51	97,51	7,65	7,65	627,15	631,29	71,30	71,68	177	187	1,32
3212	Indramayu	65,62	66,01	85,58	85,58	5,50	5,50	626,97	631,40	66,22	66,78	388	404	1,64
3213	Subang	68,95	69,09	92,38	92,38	6,60	6,60	622,14	626,32	70,03	70,43	222	239	1,35
3214	Purwakarta	66,20	66,48	95,59	95,59	7,00	7,00	627,01	630,57	69,88	70,31	231	242	1,43
3215	Karawang	65,70	66,10	93,06	93,06	6,68	6,68	622,41	627,42	68,45	69,06	305	311	1,93
3216	Bekasi	68,43	68,74	93,67	93,67	8,10	8,10	627,49	632,42	71,55	72,10	163	159	1,94
3217	Kab Bandung Barat	68,53	68,58	98,00	98,00	8,00	8,00	624,80	629,21	72,29	72,65	127	137	1,31
3271	Kota Bogor	68,59	68,68	98,70	98,70	9,60	9,60	638,69	643,65	74,73	75,16	55	57	1,72
3272	Kota Sukabumi	68,67	68,92	99,64	99,64	9,00	9,00	627,24	632,17	73,66	74,17	81	84	1,97
3273	Kota Bandung	69,55	69,61	99,58	99,64	10,10	10,10	626,13	631,84	74,86	75,35	54	55	1,93

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3274	Kota Cirebon	68,42	68,45	97,00	97,00	9,20	9,20	637,55	642,34	73,87	74,26	74	82	1,48
3275	Kota Bekasi	69,45	69,52	98,46	98,46	10,19	10,19	635,02	639,93	75,31	75,73	42	45	1,68
3276	Kota Depok	72,72	72,85	98,90	98,90	10,50	10,50	640,70	645,91	77,89	78,36	5	5	2,12
3277	Kota Cimahi	68,97	69,04	99,63	99,63	10,26	10,26	622,97	627,20	74,42	74,79	63	67	1,43
3278	Kota Tasikmalaya	68,78	69,13	99,20	99,42	8,40	8,40	621,65	626,35	72,75	73,35	109	104	2,21
3279	Kota Banjar	65,91	66,03	96,43	96,65	7,80	7,80	622,72	626,97	70,17	70,61	215	229	1,48
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>70,90</b>	<b>71,10</b>	<b>88,62</b>	<b>89,24</b>	<b>6,80</b>	<b>6,86</b>	<b>628,53</b>	<b>633,59</b>	<b>70,92</b>	<b>71,60</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2,35</b>
3301	Cilacap	69,86	70,20	90,10	90,10	6,60	6,60	625,07	631,17	70,25	70,91	211	214	2,22
3302	Banyumas	69,52	69,61	93,31	93,92	7,49	7,49	622,38	626,94	71,23	71,77	181	183	1,86
3303	Purbalingga	69,40	69,69	93,01	93,01	6,46	6,46	623,06	627,57	70,38	70,89	207	215	1,72
3304	Banjarnegara	68,51	68,72	88,24	88,24	5,98	5,98	623,98	628,33	68,54	68,99	301	312	1,43
3305	Kebumen	69,11	69,21	90,39	90,39	6,65	6,65	625,40	627,57	69,96	70,19	230	248	0,75
3306	Purworejo	69,71	70,01	88,87	89,20	7,30	7,30	628,56	633,27	70,68	71,29	198	199	2,05
3307	Wonosobo	69,20	69,49	88,91	88,91	6,11	6,11	624,60	626,77	69,22	69,55	268	290	1,06
3308	Magelang	69,90	70,01	91,34	91,34	7,10	7,10	626,51	630,88	71,03	71,43	189	194	1,37
3309	Boyolali	70,11	70,24	85,96	85,96	7,10	7,10	622,37	626,14	69,63	69,99	240	258	1,18
3310	Klaten	70,93	71,15	89,28	89,28	7,70	7,75	638,07	641,86	72,48	72,93	118	123	1,64
3311	Sukoharjo	70,04	70,11	89,75	90,36	8,10	8,15	639,00	643,38	72,46	73,01	121	118	2,00
3312	Wonogiri	72,04	72,14	82,03	82,03	6,10	6,10	635,55	639,55	70,11	70,47	218	237	1,22
3313	Karanganyar	71,92	72,05	84,15	84,76	7,00	7,05	640,92	645,79	71,59	72,21	159	150	2,18
3314	Sragen	71,94	72,18	81,05	81,15	6,40	6,50	621,57	626,26	68,98	69,57	282	287	1,90
3315	Grobogan	69,21	69,42	90,18	90,18	6,60	6,60	623,07	627,60	69,75	70,22	235	245	1,53
3316	Blora	71,01	71,13	82,36	82,97	6,02	6,02	629,88	633,90	69,11	69,63	277	285	1,66
3317	Rembang	69,75	69,91	88,18	88,79	6,60	6,65	635,04	639,29	70,54	71,12	202	206	1,99
3318	Pati	72,62	72,72	86,28	86,28	6,80	6,80	635,27	639,68	71,87	72,26	145	148	1,40
3319	Kudus	69,41	69,51	91,85	91,98	7,80	7,80	629,99	633,57	71,66	72,02	152	164	1,27
3320	Jepara	70,39	70,58	92,62	92,92	7,22	7,22	623,61	627,68	71,45	71,94	168	171	1,70
3321	Demak	70,31	70,69	90,82	90,82	7,00	7,00	626,28	630,13	71,05	71,56	187	189	1,76

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3322	Semarang	72,21	72,33	93,51	93,51	7,10	7,15	628,23	632,18	72,93	73,34	100	106	1,51
3323	Temanggung	72,16	72,32	95,93	95,93	6,70	6,70	627,37	630,82	73,08	73,43	92	99	1,33
3324	Kendal	67,40	67,77	88,93	88,93	6,69	6,69	627,91	631,64	68,91	69,40	287	298	1,59
3325	Batang	69,38	69,66	87,01	87,62	5,97	6,02	622,50	626,02	68,64	69,23	296	305	1,89
3326	Pekalongan	68,13	68,45	89,39	89,94	6,50	6,50	633,17	637,47	69,69	70,31	237	241	2,07
3327	Pemalang	66,97	67,24	87,34	87,34	6,10	6,10	628,00	632,39	67,89	68,38	330	345	1,51
3328	Tegal	67,86	68,19	88,46	89,09	6,20	6,24	629,67	634,24	68,83	69,54	293	292	2,27
3329	Brebes	66,75	67,08	84,85	84,85	5,50	5,50	625,37	629,64	66,57	67,08	382	395	1,53
3371	Kota Magelang	70,01	70,11	97,17	97,17	10,00	10,00	641,40	645,91	75,69	76,09	32	36	1,65
3372	Kota Surakarta	71,84	71,98	96,58	96,66	10,00	10,15	641,60	646,45	76,58	77,16	20	18	2,48
3373	Kota Salatiga	70,66	70,82	96,49	96,49	9,50	9,50	639,50	643,96	75,37	75,81	39	42	1,76
3374	Kota Semarang	71,90	72,01	95,94	95,94	9,80	9,80	638,78	643,55	76,11	76,54	27	29	1,80
3375	Kota Pekalongan	69,80	70,01	95,37	95,37	8,52	8,52	628,79	632,38	73,10	73,49	91	96	1,45
3376	Kota Tegal	68,14	68,37	94,87	94,87	8,06	8,06	641,73	646,30	72,72	73,20	110	113	1,76
<b>3400</b>	<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>73,10</b>	<b>73,11</b>	<b>87,78</b>	<b>89,46</b>	<b>8,59</b>	<b>8,71</b>	<b>639,88</b>	<b>643,25</b>	<b>74,15</b>	<b>74,88</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2,81</b>
3401	Kulon Progo	73,47	73,79	88,69	88,72	7,80	7,80	624,09	628,29	72,76	73,26	108	110	1,86
3402	Bantul	70,95	71,11	88,46	88,60	8,36	8,55	637,79	642,19	72,78	73,38	106	102	2,20
3403	Gunung Kidul	70,75	70,79	84,50	84,50	7,60	7,60	617,70	621,67	69,68	70,00	238	255	1,07
3404	Sleman	74,10	74,43	91,49	91,49	10,10	10,10	640,60	645,15	76,70	77,24	15	15	2,29
3471	Kota Yogyakarta	73,14	73,27	97,55	97,70	10,95	11,42	640,55	645,10	78,14	78,95	2	2	3,68
<b>3500</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>68,90</b>	<b>69,10</b>	<b>87,42</b>	<b>87,43</b>	<b>6,90</b>	<b>6,95</b>	<b>630,71</b>	<b>636,61</b>	<b>69,78</b>	<b>70,38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>2,00</b>
3501	Pacitan	70,67	70,83	91,54	91,54	6,63	6,63	617,69	622,23	70,48	70,91	203	213	1,49
3502	Ponorogo	69,06	69,31	84,93	84,93	6,46	6,46	624,99	629,87	68,55	69,07	300	310	1,63
3503	Trenggalek	70,91	71,11	92,26	92,26	7,05	7,05	625,43	630,18	71,68	72,15	150	155	1,68
3504	Tulungagung	70,80	70,99	93,47	93,47	7,50	7,50	622,60	627,11	72,00	72,45	140	146	1,61
3505	Blitar	70,25	70,44	91,04	91,04	7,09	7,09	641,14	645,73	72,28	72,74	128	135	1,66
3506	Kediri	68,99	69,18	92,47	92,47	7,45	7,45	618,07	622,78	70,39	70,85	206	216	1,57
3507	Malang	68,22	68,43	89,17	89,17	6,66	6,66	623,60	628,38	69,07	69,55	278	288	1,57
3508	Lumajang	66,35	66,58	86,28	86,28	5,90	5,90	615,50	619,67	66,20	66,65	389	408	1,34

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
		3509	Jember	62,33	62,47	82,84	82,84	6,29	6,29	612,62	617,34	63,27	63,71	
3510	Banyuwangi	66,45	66,78	86,46	86,46	6,68	6,68	620,31	625,13	67,24	67,80	359	373	1,69
3511	Bondowoso	62,36	62,61	74,30	74,30	5,20	5,20	614,93	619,70	60,76	61,26	442	461	1,29
3512	Situbondo	62,72	62,84	78,16	78,16	5,68	5,68	621,06	625,54	62,64	63,06	435	456	1,11
3513	Probolinggo	60,33	60,56	77,71	77,71	5,00	5,00	624,46	628,92	60,97	61,44	440	460	1,21
3514	Pasuruan	63,15	63,40	88,13	88,13	6,16	6,16	621,95	626,54	65,52	66,02	406	425	1,43
3515	Sidoarjo	69,89	70,08	97,37	97,37	9,49	9,49	636,02	640,90	74,87	75,35	53	54	1,90
3516	Mojokerto	69,58	69,75	94,07	94,07	7,67	7,67	628,00	633,42	71,99	72,51	142	143	1,83
3517	Jombang	69,85	69,89	92,48	92,48	7,48	7,48	625,25	630,21	71,44	71,85	170	177	1,43
3518	Nganjuk	68,27	68,44	90,44	90,44	6,83	6,83	620,30	625,24	69,25	69,73	264	274	1,55
3519	Madiun	68,43	68,55	87,10	87,10	6,72	6,72	616,80	620,99	68,24	68,63	315	336	1,24
3520	Magetan	70,50	70,68	89,80	89,80	7,19	7,41	627,98	632,14	71,20	71,79	182	181	2,05
3521	Ngawi	68,99	69,25	85,10	85,10	6,14	6,14	614,81	619,37	67,52	68,02	348	356	1,54
3522	Bojonegoro	66,79	66,87	84,55	84,55	6,39	6,39	603,59	607,27	65,50	65,83	408	428	0,96
3523	Tuban	67,17	67,34	84,95	84,95	6,09	6,09	616,90	621,03	66,61	67,02	380	399	1,23
3524	Lamongan	67,73	67,85	86,60	86,60	6,76	6,76	618,25	623,19	67,88	68,33	331	346	1,41
3525	Gresik	70,30	70,49	94,04	94,04	8,40	8,40	628,92	633,90	73,00	73,49	93	95	1,82
3526	Bangkalan	62,90	63,01	82,76	82,76	5,00	5,00	617,33	622,09	62,97	63,40	433	454	1,15
3527	Sampang	61,11	61,69	64,12	64,12	3,77	3,77	618,21	622,77	56,99	57,66	450	470	1,56
3528	Pamekasan	62,70	63,19	79,45	79,57	5,72	5,72	615,05	619,49	62,49	63,13	436	455	1,71
3529	Sumenep	64,23	64,35	78,62	78,62	4,90	5,01	630,20	635,21	63,71	64,24	428	448	1,48
3571	Kota Kediri	69,78	69,95	96,80	97,40	9,61	9,66	631,87	636,89	74,45	75,11	61	59	2,55
3572	Kota Blitar	71,44	71,66	96,78	97,22	9,44	9,55	640,09	645,52	75,88	76,60	29	27	2,99
3573	Kota Malang	69,31	69,61	97,19	97,19	10,80	10,80	639,13	643,17	75,72	76,19	31	33	1,95
3574	Kota Probolinggo	69,20	69,48	92,01	92,32	8,29	8,29	640,63	644,53	72,76	73,29	107	109	1,92
3575	Kota Pasuruan	66,21	66,29	95,93	95,93	8,74	8,74	639,40	643,92	72,20	72,60	130	139	1,41
3576	Kota Mojokerto	70,97	71,13	96,77	97,10	9,66	9,66	638,60	642,41	75,66	76,11	33	35	1,88
3577	Kota Madiun	70,46	70,60	97,71	97,71	10,17	10,17	631,57	636,65	75,42	75,89	38	40	1,93
3578	Kota Surabaya	70,16	70,40	97,94	97,94	9,82	9,84	642,17	646,67	75,87	76,36	30	31	2,06
3579	Kota Batu	68,64	68,87	97,30	97,30	8,19	8,20	631,26	636,04	72,83	73,33	103	108	1,83
<b>3600</b>	<b>BANTEN</b>	<b>64,50</b>	<b>64,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>621,00</b>	<b>625,52</b>	<b>69,29</b>	<b>69,70</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>1,32</b>
3601	Pandeglang	63,09	63,28	96,29	96,29	6,38	6,38	620,90	624,33	67,39	67,75	354	375	1,13
3602	Lebak	63,11	63,14	94,10	94,10	6,20	6,20	620,40	625,08	66,74	67,11	378	394	1,13
3603	Tangerang	65,32	65,44	95,34	95,34	8,90	8,90	626,50	631,19	70,71	71,14	197	205	1,46
3604	Serang	62,29	62,65	95,54	94,58	7,00	7,00	623,80	628,50	67,45	67,80	352	372	1,07

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
3671	Kota Tangerang	68,23	68,29	98,34	98,34	9,80	9,82	636,21	639,44	74,40	74,70	64	69	1,17
3672	Kota Cilegon	68,45	68,49	98,70	98,70	9,64	9,64	635,40	641,75	74,43	74,94	62	64	1,99
3673	Kota Serang	-	64,12	-	95,85	-	7,01	-	635,31	-	69,43	-	294	-
<b>5100</b>	<b>BALI</b>	<b>70,60</b>	<b>70,61</b>	<b>86,21</b>	<b>86,94</b>	<b>7,60</b>	<b>7,81</b>	<b>624,90</b>	<b>626,63</b>	<b>70,53</b>	<b>70,98</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1,55</b>
5101	Jembrana	71,63	71,65	88,00	88,96	7,48	7,60	624,84	628,68	71,40	72,02	174	165	2,14
5102	Tabanan	74,32	74,27	88,60	89,15	7,49	7,78	625,81	629,83	73,11	73,73	90	91	2,31
5103	Badung	71,64	71,70	91,66	92,16	9,11	9,11	627,58	631,88	73,64	74,12	82	86	1,81
5104	Gianyar	71,99	72,01	85,00	85,00	7,94	7,94	629,75	634,08	71,66	72,00	154	168	1,21
5105	Klungkung	68,95	69,00	80,02	80,98	6,90	7,02	641,69	645,88	69,01	69,66	281	280	2,11
5106	Bangli	71,40	71,47	82,11	82,11	6,50	6,50	627,65	630,57	69,46	69,72	247	275	0,86
5107	Karangasem	67,77	67,80	72,14	72,14	5,37	5,37	637,09	641,30	65,11	65,46	414	435	0,98
5108	Buleleng	68,65	68,78	87,60	87,60	6,73	6,89	625,52	629,77	69,15	69,67	275	278	1,68
5171	Kota Denpasar	72,85	72,91	97,04	97,14	10,25	10,47	630,69	635,43	76,59	77,18	19	17	2,50
<b>5200</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>61,20</b>	<b>61,50</b>	<b>80,10</b>	<b>80,13</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>630,48</b>	<b>633,58</b>	<b>63,71</b>	<b>64,12</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>1,14</b>
5201	Lombok Barat	59,54	59,97	73,77	76,40	5,66	5,73	614,03	618,09	59,34	60,53	444	463	2,91
5202	Lombok Tengah	59,82	60,24	71,12	71,16	5,35	5,35	618,36	623,57	59,02	59,66	446	465	1,56
5203	Lombok Timur	59,16	59,70	79,81	79,81	6,31	6,31	616,11	620,66	61,12	61,77	439	459	1,67
5204	Sumbawa	60,40	60,51	89,69	89,69	7,10	7,10	621,33	625,40	64,99	65,36	416	436	1,08
5205	Dompu	60,70	60,83	82,80	82,80	7,00	7,00	627,66	631,47	64,04	64,40	424	446	1,01
5206	Bima	62,01	62,31	85,75	85,75	7,23	7,23	605,19	609,88	63,86	64,39	427	447	1,47
5207	Sumbawa Barat	60,76	60,94	90,61	90,71	7,00	7,00	623,92	623,92	65,52	65,64	407	431	0,35
5208	Lombok Utara	-	59,80	-	70,86	-	4,68	-	609,87	-	57,79	-	468	-
5271	Kota Mataram	65,19	65,66	91,80	91,80	9,05	9,05	636,28	641,94	70,71	71,41	196	195	2,39
5272	Kota Bima	62,61	62,74	92,49	92,59	9,24	9,24	604,50	608,42	67,13	67,52	365	384	1,21
<b>5300</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>66,70</b>	<b>67,00</b>	<b>87,25</b>	<b>87,66</b>	<b>6,42</b>	<b>6,55</b>	<b>594,28</b>	<b>599,93</b>	<b>65,36</b>	<b>66,15</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>2,28</b>
5301	Sumba Barat	64,11	64,48	74,62	77,91	5,70	5,84	597,40	601,47	60,82	62,17	441	458	3,46
5302	Sumba Timur	61,42	61,62	82,55	82,96	5,80	5,93	585,66	588,89	60,26	60,80	443	462	1,37
5303	Kupang	64,77	65,02	88,72	88,72	6,71	6,71	590,91	595,02	64,57	65,02	419	439	1,29
5304	Timor Tengah Selatan	66,40	66,60	84,18	84,18	6,08	6,08	596,44	600,29	64,43	64,83	420	440	1,14
5305	Timor Tengah Utara	67,27	67,71	87,19	87,45	6,11	6,24	599,52	603,37	65,84	66,53	398	411	2,02
5306	Belu	64,72	65,30	82,79	82,79	6,06	6,06	591,91	595,48	62,82	63,41	434	453	1,61
5307	Alor	65,89	66,25	95,94	95,94	7,38	7,38	591,19	595,18	67,31	67,82	355	368	1,56
5308	Lembata	66,17	66,34	92,57	92,57	6,34	6,47	593,08	597,29	66,10	66,61	391	409	1,51

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
5309	Flores Timur	67,17	67,51	88,79	88,79	6,45	6,58	604,20	608,26	66,74	67,34	377	389	1,79
5310	Sikka	68,06	68,40	90,06	90,47	6,00	6,13	589,17	592,85	66,04	66,69	392	407	1,94
5311	Ende	64,16	64,41	92,80	93,21	6,64	6,77	594,89	600,46	65,39	66,14	409	417	2,17
5312	Ngada	66,77	66,93	94,08	94,49	6,60	6,73	606,07	610,30	67,95	68,56	329	339	1,88
5313	Manggarai	66,65	66,89	90,97	90,97	6,60	6,71	587,69	590,37	65,78	66,21	400	415	1,23
5314	Rote Nda	66,78	67,22	88,14	88,55	6,17	6,18	583,88	588,22	64,61	65,29	418	437	1,92
5315	Manggarai Barat	65,75	65,99	88,70	88,70	6,23	6,23	580,99	585,20	63,99	64,44	426	444	1,27
5316	Sumba Barat Daya	62,82	63,11	71,60	72,01	5,40	5,40	598,52	602,72	59,29	59,87	445	464	1,42
5317	Sumba Tengah	62,22	62,42	71,40	71,81	5,20	5,20	596,66	598,95	58,63	59,01	448	467	0,92
5318	Nageko	63,09	63,27	93,76	93,76	6,69	6,69	598,52	602,55	65,32	65,73	412	430	1,18
5319	Manggarai Timur	-	67,04	-	89,18	-	5,92	-	581,05	-	64,58	-	443	-
5371	Kota Kupang	71,48	71,93	98,33	98,33	10,89	10,89	621,76	627,31	75,91	76,58	28	28	2,80
<b>6100</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>66,10</b>	<b>66,30</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>617,90</b>	<b>624,74</b>	<b>67,53</b>	<b>68,17</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>1,96</b>
6101	Sambas	60,48	60,70	89,50	89,50	5,90	5,90	607,20	614,92	63,01	63,73	432	450	1,95
6102	Bengkayang	68,40	68,57	88,68	88,68	6,03	6,03	594,10	599,30	66,32	66,81	386	403	1,46
6103	Landak	64,72	64,98	91,45	91,45	6,86	6,86	606,10	608,21	66,43	66,74	384	406	0,92
6104	Pontianak	67,03	67,12	89,40	89,40	6,40	6,48	612,80	617,52	67,43	67,90	353	363	1,46
6105	Sanggau	67,61	67,99	89,92	89,92	6,40	6,40	609,80	609,95	67,64	67,86	341	364	0,69
6106	Ketapang	66,69	67,02	88,87	88,87	5,90	6,22	603,28	608,43	66,02	66,84	393	402	2,41
6107	Sintang	67,68	67,91	90,41	90,41	6,25	6,58	599,60	602,01	66,89	67,44	374	386	1,68
6108	Kapuas Hulu	66,26	66,39	92,55	92,55	7,10	7,10	626,31	627,31	69,26	69,41	262	295	0,48
6109	Sekadau	67,22	67,27	88,98	88,98	6,06	6,06	594,10	598,62	65,75	66,13	401	419	1,11
6110	Melawai	67,53	67,63	92,32	92,32	7,20	7,20	595,40	598,62	67,61	67,91	343	361	0,93
6111	Kayong Utara	65,07	65,33	88,20	88,20	5,60	5,60	596,10	600,67	64,19	64,69	422	442	1,40
6112	Kubu Raya	-	66,17	-	85,83	-	6,16	-	617,00	-	66,31	-	414	-
6171	Kota Pontianak	66,65	66,86	93,59	93,59	9,11	9,11	631,40	636,18	71,59	72,08	158	160	1,70
6172	Kota Singkawang	66,80	66,95	89,62	89,62	7,30	7,30	607,50	611,76	67,61	68,02	344	357	1,28
<b>6200</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>70,90</b>	<b>71,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,67</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>624,79</b>	<b>628,64</b>	<b>73,49</b>	<b>73,88</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1,47</b>
6201	Kotawaringin Barat	71,05	71,18	93,63	94,09	7,60	7,60	621,20	628,33	72,14	72,86	134	125	2,59
6202	Kotawaringin Timur	69,16	69,29	98,70	98,70	8,00	8,00	626,25	631,34	72,90	73,36	101	103	1,71
6203	Kapuas	70,43	70,54	95,95	96,13	7,30	7,30	627,60	630,24	72,58	72,89	113	124	1,11
6204	Barito Selatan	68,08	68,14	98,95	98,95	8,35	8,35	625,50	630,29	72,56	72,96	114	120	1,47
6205	Barito Utara	71,57	71,72	98,10	98,17	8,37	8,37	622,80	627,44	74,12	74,57	70	72	1,76
6206	Sukamara	67,67	67,73	95,53	95,53	7,02	7,02	626,30	630,42	70,65	71,00	199	210	1,19
6207	Lamandau	66,93	67,05	98,64	98,64	7,60	7,60	628,62	633,50	71,54	71,98	164	170	1,56

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
6208	Seruyan	67,85	67,90	99,30	99,30	7,70	7,70	620,20	624,81	71,62	72,00	157	167	1,33
6209	Katingan	67,18	67,30	99,40	99,40	7,76	7,76	623,70	629,00	71,59	72,06	161	162	1,67
6210	Pulang Pisau	67,30	67,38	93,21	93,84	7,22	7,22	626,60	631,13	70,10	70,63	219	226	1,79
6211	Gunung Mas	67,55	67,68	99,51	99,51	8,68	8,68	622,40	627,39	72,40	72,85	125	127	1,65
6212	Barito Timur	67,67	67,73	97,45	97,95	8,44	8,44	620,20	625,01	71,66	72,17	153	152	1,80
6213	Murung Raya	67,83	67,95	99,30	99,93	6,96	6,96	627,50	632,00	71,62	72,18	156	151	1,95
6271	Kota Palangka Raya	73,07	73,17	99,47	99,47	10,50	10,50	631,00	635,88	77,47	77,90	7	8	1,91
<b>6300</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>62,60</b>	<b>63,10</b>	<b>95,26</b>	<b>95,30</b>	<b>7,40</b>	<b>7,44</b>	<b>625,80</b>	<b>630,83</b>	<b>68,01</b>	<b>68,72</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>2,20</b>
6301	Tanah Laut	67,62	67,90	93,18	93,18	6,54	6,61	627,65	632,18	69,85	70,40	232	240	1,84
6302	Kota Baru	64,72	64,98	94,00	94,00	7,00	7,00	643,53	648,61	69,98	70,52	226	234	1,79
6303	Banjar	64,04	64,62	95,99	95,99	7,10	7,10	634,61	639,84	69,43	70,16	248	249	2,37
6304	Barito Kuala	60,82	61,18	92,18	92,18	6,68	6,68	626,83	626,83	65,89	66,09	397	422	0,58
6305	Tapin	66,67	66,91	93,92	93,92	6,94	6,94	621,90	626,06	69,34	69,79	256	269	1,48
6306	Hulu Sungai Selatan	63,14	63,42	96,47	96,47	7,01	7,33	639,51	644,17	69,35	70,11	255	252	2,47
6307	Hulu Sungai Tengah	64,15	64,54	97,40	97,40	7,30	7,39	625,95	631,50	69,29	70,00	259	256	2,31
6308	Hulu Sungai Utara	61,87	62,28	95,86	95,86	6,80	7,22	622,00	626,09	67,01	67,86	369	365	2,58
6309	Tabalong	62,54	62,74	95,92	95,92	7,76	7,76	627,26	631,90	68,51	68,98	302	316	1,48
6310	Tanah Bumbu	63,99	64,32	93,40	94,08	6,80	7,00	625,20	630,86	67,88	68,80	332	326	2,85
6311	Balangan	61,12	61,36	94,90	94,90	6,30	6,30	610,63	614,93	65,13	65,60	413	432	1,34
6371	Kota Banjarmasin	65,78	65,92	97,94	97,94	9,27	9,27	633,87	638,87	72,38	72,85	126	128	1,68
6372	Kota Banjar Baru	66,94	67,14	97,75	97,75	9,54	9,54	639,00	644,07	73,58	74,09	83	87	1,90
<b>6400</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>70,60</b>	<b>70,80</b>	<b>95,70</b>	<b>96,36</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	<b>628,10</b>	<b>634,52</b>	<b>73,77</b>	<b>74,52</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2,87</b>
6401	Pasir	72,06	72,39	94,61	94,61	7,38	7,61	620,52	625,82	72,70	73,46	112	97	2,79
6402	Kutai Barat	69,70	69,89	95,49	95,49	7,75	7,75	621,50	623,05	71,93	72,16	144	154	0,80
6403	Kutai	67,68	67,76	96,41	96,41	8,30	8,30	622,85	628,71	71,53	72,03	165	163	1,75
6404	Kutai Timur	68,08	68,25	95,48	95,48	7,57	7,61	615,71	619,00	70,46	70,84	204	217	1,28
6405	Berau	69,16	69,41	94,82	95,48	7,83	7,86	628,90	633,12	72,12	72,75	136	134	2,29
6406	Malinau	68,01	68,11	92,33	92,33	7,61	7,61	640,82	641,32	71,68	71,78	149	182	0,34
6407	Bulongan	72,52	72,55	93,58	95,50	7,58	7,72	626,40	631,82	73,33	74,30	86	80	3,61
6408	Nunukan	70,84	71,07	93,30	93,30	7,40	7,40	626,00	633,26	72,17	72,86	133	126	2,46
6409	Penajam Paser Utara	71,04	71,18	93,80	94,46	7,53	7,57	619,55	625,27	72,00	72,69	141	136	2,47
6410	Tana Tidung	-	72,58	-	88,00	-	7,00	-	613,17	-	70,68	-	221	-
6471	Kota Balikpapan	71,52	71,73	97,98	98,32	10,03	10,03	640,00	646,41	76,62	77,31	16	12	2,94
6472	Kota Samarinda	70,61	70,81	96,95	97,23	9,73	9,73	639,50	643,80	75,62	76,12	34	34	2,06



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
		2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008	2007-2008			
6473	Kota Tarakan	71,19	71,37	97,89	97,89	9,13	9,30	634,21	639,38	75,30	75,92	44	38	2,52
6474	Kota Bontang	71,89	72,11	98,10	98,34	9,90	9,97	625,25	628,37	75,61	76,08	35	37	1,91
<b>7100</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>72,00</b>	<b>72,01</b>	<b>99,30</b>	<b>99,31</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	<b>619,39</b>	<b>625,58</b>	<b>74,68</b>	<b>75,16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>
7101	Bolaang Mongondow	70,97	71,19	98,61	98,22	7,39	7,39	607,31	608,55	71,98	72,11	143	158	0,46
7102	Minahasa	72,07	72,18	99,52	99,52	8,80	8,80	615,99	619,74	74,50	74,86	59	66	1,39
7103	Kep.Sangihe Talaud	72,28	72,50	98,50	98,50	7,70	7,70	623,94	628,55	74,19	74,67	68	70	1,85
7104	Kepulauan Talaud	70,86	71,29	99,30	99,30	8,47	8,47	619,00	623,35	73,77	74,34	78	79	2,18
7105	Minahasa Selatan	71,72	71,89	99,40	99,40	8,54	8,54	606,01	610,86	73,32	73,79	88	89	1,75
7106	Minahasa Utara	72,10	72,20	99,68	99,68	9,07	9,07	617,82	622,71	74,90	75,33	52	56	1,72
7107	Bolaang Mongondow Utara	69,18	69,45	98,30	98,30	7,10	7,10	615,13	620,13	71,30	71,84	178	180	1,86
7108	Minahasa Tenggara	69,66	69,77	99,33	99,38	8,08	8,08	601,26	605,77	71,45	71,87	167	175	1,47
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	68,18	68,31	99,54	99,61	8,24	8,24	618,20	623,27	72,10	72,58	138	142	1,71
7110	Bolaang Mongondow Selatan	-	71,20	-	98,21	-	6,05	-	589,52	-	69,65	-	282	-
7111	Bolaang Mongondow Timur	-	71,22	-	99,38	-	6,30	-	607,37	-	71,49	-	191	-
7171	Manado	72,26	72,37	99,83	99,83	10,58	10,58	625,98	631,88	76,76	77,28	13	13	2,22
7172	Kota Bitung	70,08	70,20	98,93	99,03	9,20	9,20	623,60	628,47	74,15	74,61	69	71	1,81
7173	Kota Tomohon	71,96	72,16	99,83	99,83	9,60	9,60	616,19	621,61	75,12	75,65	48	50	2,13
7174	Kota Kotamobago	71,08	71,35	99,49	99,49	8,85	8,85	614,84	620,26	73,90	74,46	73	74	2,16
<b>7200</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>65,90</b>	<b>66,10</b>	<b>94,94</b>	<b>95,68</b>	<b>7,73</b>	<b>7,81</b>	<b>616,98</b>	<b>622,35</b>	<b>69,34</b>	<b>70,09</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>2,45</b>
7201	Banggai Kepulauan	62,66	63,09	94,92	94,92	7,09	7,09	602,31	607,70	65,93	66,59	394	410	1,92
7202	Banggai	67,95	68,10	94,87	95,69	7,30	7,59	606,33	611,55	69,33	70,21	257	246	2,88
7203	Morowali	65,11	65,22	97,24	97,24	7,59	7,63	616,00	621,47	69,23	69,75	267	273	1,68
7204	Poso	64,36	64,53	97,88	97,88	8,31	8,31	602,75	608,17	68,47	68,98	303	314	1,62
7205	Donggala	64,22	64,53	94,40	93,87	7,26	7,48	618,90	624,45	68,09	68,73	321	329	2,01
7206	Toli-Toli	63,66	63,83	94,30	95,12	7,23	7,32	607,76	612,93	66,88	67,62	375	380	2,23
7207	Buol	64,77	64,94	98,20	98,20	7,90	8,15	598,87	604,04	68,17	68,84	318	325	2,12
7208	Parigi Moutong	64,27	64,53	93,06	93,55	7,02	7,02	612,50	617,86	67,15	67,81	363	370	2,03
7209	Tojo Una-Una	63,39	63,59	97,44	97,44	7,81	7,81	600,29	605,77	67,28	67,81	357	371	1,63
7210	Sigi	-	64,88	-	96,37	-	7,94	-	586,52	-	66,90	-	401	-
7271	Kodya Palu	69,22	69,44	99,23	99,23	10,87	10,87	625,69	631,07	75,14	75,67	47	48	2,15
<b>7300</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>69,40</b>	<b>69,60</b>	<b>86,24</b>	<b>86,53</b>	<b>7,23</b>	<b>7,23</b>	<b>625,23</b>	<b>630,81</b>	<b>69,62</b>	<b>70,22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1,99</b>
7301	Selayar	67,33	67,47	88,99	88,99	6,62	6,62	613,73	619,02	67,74	68,23	336	348	1,51

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
7302	Bulukumba	71,02	71,32	85,20	85,20	6,45	6,45	619,60	625,22	69,27	69,87	261	264	1,95
7303	Bantaeng	72,38	72,65	76,58	76,58	5,80	5,80	628,57	633,78	68,33	68,87	311	323	1,73
7304	Jeneponto	64,55	64,70	75,74	76,48	5,86	5,86	623,25	628,00	63,42	64,04	429	449	1,68
7305	Takalar	68,38	68,67	80,09	80,09	6,21	6,21	625,49	630,44	66,95	67,49	370	385	1,64
7306	Gowa	71,07	71,25	79,78	79,78	6,36	6,36	630,40	635,69	68,87	69,37	290	300	1,63
7307	Sinjai	71,07	71,24	86,44	86,44	6,62	6,62	600,64	605,88	68,24	68,74	314	328	1,57
7308	Maros	70,78	71,14	82,60	82,89	6,47	6,47	627,89	632,59	69,22	69,85	269	265	2,03
7309	Pangkajene Kepulauan	68,27	68,44	85,60	85,89	6,52	6,52	617,50	622,78	67,73	68,30	337	347	1,76
7310	Barru	67,92	68,22	87,66	87,66	7,17	7,17	623,98	629,25	68,97	69,54	283	291	1,85
7311	Bone	68,59	68,96	84,78	84,78	6,21	6,21	628,50	633,90	68,34	68,96	310	317	1,96
7312	Soppeng	71,30	71,42	84,59	84,59	6,85	6,85	628,30	633,89	70,26	70,76	210	219	1,66
7313	Wajo	69,54	69,86	81,68	81,97	5,80	5,80	630,71	636,25	68,04	68,72	323	332	2,11
7314	Sidenreng Rappang	71,42	71,65	89,52	89,52	7,20	7,20	621,67	627,36	71,18	71,74	183	184	1,95
7315	Pinrang	71,23	71,38	89,10	89,10	6,88	6,88	630,60	635,82	71,43	71,91	173	174	1,69
7316	Enrekang	74,25	74,34	89,76	89,76	8,14	8,14	619,42	624,45	73,32	73,76	87	90	1,64
7317	Luwu	72,55	72,80	91,47	91,47	7,70	7,70	619,80	624,50	72,46	72,96	120	121	1,80
7318	Tana Toraja	74,06	74,09	83,80	84,96	7,43	7,43	604,05	608,62	70,18	70,81	214	218	2,10
7322	Luwu Utara	70,91	71,13	92,03	92,03	7,00	7,00	637,85	644,13	72,55	73,15	115	116	2,19
7325	Luwu Timur	70,61	70,72	93,13	93,13	7,47	7,47	620,99	620,99	71,67	71,73	151	185	0,23
7326	Toraja Utara	-	73,45	-	82,26	-	7,02	-	593,87	-	68,41	-	344	-
7371	Kota Makassar	72,75	72,89	96,62	96,62	10,50	10,50	639,83	646,37	77,33	77,92	9	7	2,58
7372	Kota Pare Pare	73,56	73,58	96,20	96,49	9,45	9,45	634,12	639,61	76,47	76,97	22	21	2,12
7373	Kota Palopo	72,02	72,03	97,30	97,30	9,66	9,66	625,79	631,24	75,37	75,80	40	43	1,74
<b>7400</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>67,20</b>	<b>67,40</b>	<b>91,30</b>	<b>91,42</b>	<b>7,71</b>	<b>7,74</b>	<b>604,96</b>	<b>611,72</b>	<b>68,32</b>	<b>69,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>2,15</b>
7401	Buton	67,55	67,89	85,72	85,72	6,10	6,27	617,98	623,50	67,08	67,82	366	369	2,23
7402	Muna	65,69	65,79	87,59	87,59	7,17	7,30	600,79	606,14	65,93	66,49	395	412	1,64
7403	Konawe/Kab Kendari	66,47	66,74	93,95	94,60	7,96	7,98	595,60	601,40	67,96	68,72	328	331	2,36
7404	Kolaka	66,36	66,61	93,14	93,14	7,70	7,70	624,53	626,63	69,76	70,06	234	254	1,00
7405	Konawe Selatan	67,16	67,31	94,10	94,10	7,60	7,60	598,98	604,15	68,37	68,86	308	324	1,54
7406	Bombana	67,10	67,30	87,55	88,20	6,20	6,23	592,57	598,00	65,35	66,05	411	423	2,00
7407	Wakatobi	67,69	67,83	88,78	88,80	6,50	6,52	584,38	589,39	65,54	66,03	405	424	1,42
7408	Kolaka Utara	65,14	65,27	93,02	93,02	7,40	7,40	608,20	611,61	67,57	67,91	346	362	1,05
7409	Konawe Utara	66,19	66,47	93,80	93,80	7,00	7,00	592,57	598,33	66,83	67,43	376	388	1,81

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka		Angka		Rata-rata		Pengeluaran		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
		harapan hidup (tahun)		melek huruf (persen)		lama sekolah (tahun)		per kapita diseuaikan				IPM (Nasional)		
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
7410	Buton Utara	67,33	67,64	86,45	86,50	7,59	7,59	600,80	601,82	66,89	67,16	373	393	0,79
7471	Kota Kendari	68,88	68,95	98,37	98,37	11,01	11,01	621,70	628,14	74,55	75,09	57	60	2,09
7472	Kota Bau-Bau	69,50	69,79	95,16	95,16	9,55	9,55	601,75	607,11	71,56	72,14	162	156	2,03
<b>7500</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>65,90</b>	<b>66,20</b>	<b>95,75</b>	<b>95,75</b>	<b>6,91</b>	<b>6,91</b>	<b>615,94</b>	<b>619,70</b>	<b>68,83</b>	<b>69,29</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>1,46</b>
7501	Boalemo	67,32	67,52	95,20	95,20	6,00	6,00	595,40	600,56	67,24	67,75	358	376	1,55
7502	Gorontalo	67,10	67,71	94,49	94,55	6,40	6,47	601,94	611,98	67,77	68,94	334	319	3,65
7503	Pokuwato	67,07	67,23	97,03	97,03	6,05	6,05	611,78	612,15	68,81	68,93	294	320	0,37
7504	Bone Bolango	67,60	67,88	97,10	97,10	7,45	7,45	609,31	614,20	69,97	70,50	228	235	1,76
7505	Gorontalo Utara	65,66	66,11	93,70	93,70	6,20	6,20	612,83	618,14	67,48	68,14	351	352	2,02
7571	Kota Gorontalo	66,14	66,26	99,41	99,41	9,46	9,46	615,60	620,96	71,64	72,12	155	157	1,70
<b>7600</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>67,20</b>	<b>67,40</b>	<b>86,40</b>	<b>87,31</b>	<b>6,51</b>	<b>6,99</b>	<b>622,90</b>	<b>625,04</b>	<b>67,72</b>	<b>68,55</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>2,59</b>
7601	Majene	64,43	64,74	93,79	94,70	7,64	8,14	628,90	634,30	69,12	70,28	276	243	3,75
7602	Polewali Mamasasa	64,18	64,44	82,59	83,50	6,31	6,81	619,30	624,77	64,77	65,91	417	427	3,23
7603	Mamasasa	70,78	70,94	84,10	84,62	6,38	6,38	623,60	629,19	69,16	69,79	273	270	2,06
7604	Mamuju	67,76	68,00	88,77	88,77	6,32	6,72	612,30	618,34	67,60	68,50	345	341	2,77
7605	Mamuju Utara	67,44	67,47	95,33	95,33	6,62	6,62	608,90	614,25	68,84	69,27	292	303	1,39
<b>8100</b>	<b>MALUKU</b>	<b>66,80</b>	<b>67,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,12</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>601,26</b>	<b>605,02</b>	<b>69,96</b>	<b>70,38</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1,42</b>
8101	Maluku Tenggara Barat	63,73	63,99	99,34	99,34	8,51	8,51	583,87	587,68	67,14	67,58	364	381	1,33
8102	Maluku Tenggara	67,40	67,59	99,52	99,52	8,74	8,74	605,25	609,27	71,04	71,45	188	193	1,45
8103	Maluku Tengah	65,33	65,48	98,62	99,08	8,10	8,18	603,21	607,51	69,06	69,63	279	284	1,86
8104	Buru	66,75	67,17	92,80	92,80	7,20	7,20	598,04	602,01	67,49	68,03	349	355	1,66
8105	Kepulauan Aru	67,11	67,31	98,80	98,80	7,50	7,50	593,78	598,06	68,91	69,36	286	301	1,43
8106	Seram Bagian Barat	66,21	66,33	98,00	98,00	8,20	8,20	587,53	591,82	68,28	68,67	313	334	1,25
8107	Seram Bagian Timur	65,21	65,43	97,93	97,93	7,60	7,60	573,52	583,45	66,18	67,06	390	397	2,61
8108	Maluku Barat Daya	-	63,72	-	98,11	-	7,98	-	577,29	-	65,96	-	426	-
8109	Buru Selatan	-	66,87	-	89,54	-	6,20	-	619,04	-	67,71	-	377	-
8171	Kota Ambon	72,66	72,70	99,19	99,19	11,09	11,09	629,06	633,91	77,46	77,86	8	9	1,76
8172	Kota Tual	-	68,03	-	99,68	-	9,44	-	656,60	-	75,90	-	39	-
<b>8200</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>65,10</b>	<b>65,40</b>	<b>95,20</b>	<b>95,44</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>593,88</b>	<b>595,69</b>	<b>67,82</b>	<b>68,18</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1,11</b>
8201	Halmahera Barat	63,72	63,94	95,30	95,30	7,40	7,65	585,70	589,32	65,56	66,14	404	418	1,70
8202	Halmahera Tengah	65,36	65,79	96,70	96,70	8,00	8,00	590,70	595,04	67,61	68,18	342	350	1,76
8203	Kepulauan Sula	63,96	64,30	97,33	97,33	7,60	7,70	587,90	592,12	66,46	67,04	383	398	1,75
8204	Halmahera Selatan	64,82	65,03	95,80	95,80	7,40	7,40	594,20	596,82	66,93	67,25	371	390	0,97
8205	Halmahera Utara	64,92	65,23	95,90	95,90	7,23	7,23	590,20	595,75	66,58	67,18	381	391	1,79

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

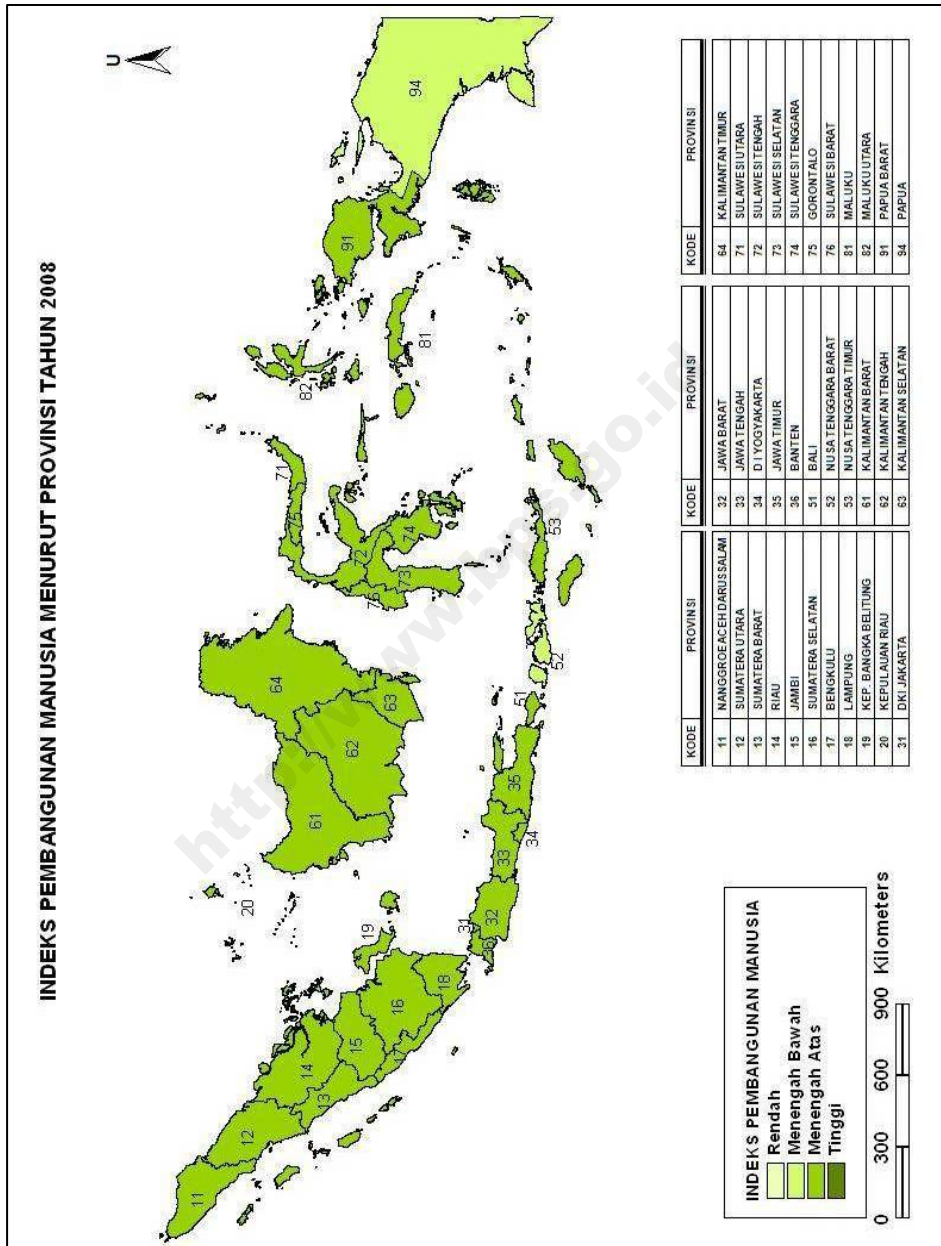
Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
		8206	Halmahera Timur	64,33	64,66	95,42	95,42	7,80	7,80	591,70	594,34	66,68	67,06	
8271	Kota Ternate	69,30	69,68	98,43	98,88	10,43	10,61	629,00	632,65	74,93	75,66	51	49	2,91
8272	Kota Tidore Kepulauan	64,49	64,68	96,82	97,60	8,27	8,45	600,80	605,41	68,13	68,90	320	321	2,41
<b>9100</b>	<b>PAPUA BARAT</b>	<b>67,60</b>	<b>67,90</b>	<b>90,32</b>	<b>92,15</b>	<b>7,65</b>	<b>7,67</b>	<b>592,07</b>	<b>593,13</b>	<b>67,28</b>	<b>67,95</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>2,05</b>
9101	Fak-Fak	69,27	69,81	97,17	97,17	8,93	8,93	577,90	582,51	69,58	70,24	242	244	2,16
9102	Kaimana	69,06	69,26	95,48	95,48	7,10	7,10	591,70	596,37	68,80	69,27	295	304	1,50
9103	Teluk Wondama	66,78	67,00	81,02	82,85	5,99	6,39	590,40	597,65	63,40	64,79	430	441	3,79
9104	Teluk Bintuni	67,26	67,55	80,84	82,67	6,44	6,85	596,10	596,30	64,40	65,29	421	438	2,48
9105	Manokwari	67,12	67,38	83,54	85,37	7,19	7,59	579,20	584,87	64,17	65,46	423	434	3,58
9106	Sorong Selatan	66,19	66,33	87,90	88,07	7,90	7,90	582,10	585,70	65,38	65,77	410	429	1,13
9107	Sorong	66,71	67,12	91,39	91,39	8,00	8,00	591,10	596,11	67,21	67,82	360	367	1,88
9108	Raja Ampat	65,15	65,43	89,93	92,69	7,00	7,00	554,60	558,87	62,47	63,57	437	452	2,93
9171	Kota Sorong	70,75	71,12	99,10	99,10	10,10	10,52	628,30	633,78	75,59	76,52	36	30	3,83
9400	PAPUA	67,90	68,10	75,41	75,41	6,52	6,52	593,42	599,65	63,41	64,00	33	33	1,62
9401	Merauke	62,03	62,13	87,10	87,10	8,48	8,48	591,40	595,94	64,03	64,44	425	445	1,14
9402	Jayawijaya	65,93	66,06	47,21	51,63	3,38	3,77	583,70	589,09	52,97	54,72	451	471	3,74
9403	Jayapura	66,83	66,96	96,00	96,00	8,00	8,75	612,80	618,26	69,97	71,02	227	209	3,49
9404	Nabire	66,96	67,12	83,20	83,20	6,46	6,46	606,90	612,26	65,60	66,10	403	421	1,46
9408	Yapen Waropen	66,57	67,01	88,12	88,12	6,50	6,50	627,00	631,91	68,06	68,68	322	333	1,94
9409	Biak Namfor	65,72	65,94	97,48	97,48	9,25	9,25	586,10	590,18	68,55	68,99	299	313	1,38
9410	Paniai	66,85	67,10	62,90	62,90	6,20	6,20	579,60	583,44	58,74	59,17	447	466	1,04
9411	Puncak Jaya	66,96	67,21	86,80	86,80	6,10	6,10	620,71	626,46	67,20	67,78	361	374	1,78
9412	Mimika	69,26	69,55	86,90	86,90	6,70	6,70	606,30	606,30	67,84	67,99	333	358	0,49
9413	Boven Digoel	66,17	66,43	31,70	31,70	3,00	3,00	574,40	579,57	48,65	49,20	455	475	1,06
9414	Mappi	65,64	65,79	31,30	31,30	3,80	3,80	576,60	582,77	49,04	49,59	454	474	1,09
9415	Asmat	65,62	66,10	31,00	31,00	3,86	3,86	583,50	589,58	49,53	50,27	453	473	1,46
9416	Yahukimo	66,03	66,25	31,80	31,80	2,40	2,40	576,40	581,79	48,31	48,85	456	476	1,04
9417	Pegunungan Bintang	65,17	65,33	31,60	31,60	2,20	2,20	573,14	579,20	47,38	47,94	457	480	1,06
9418	Tolikara	65,66	65,72	32,86	32,86	2,40	2,40	602,89	608,49	50,38	50,85	452	472	0,94
9419	Sarmi	66,13	66,17	87,10	87,10	6,40	6,40	606,00	611,65	65,90	66,35	396	413	1,34
9420	Keerom	66,62	66,75	91,10	91,10	7,30	7,30	609,40	615,84	67,99	68,55	325	340	1,77
9426	Waropen	64,59	64,86	76,50	76,50	6,27	6,27	598,00	602,42	61,97	62,46	438	457	1,30
9427	Supiori	65,29	65,48	95,37	95,37	7,70	7,70	588,97	595,83	66,92	67,55	372	382	1,91

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2. IPM dan Komponen, Tahun 2007-2008

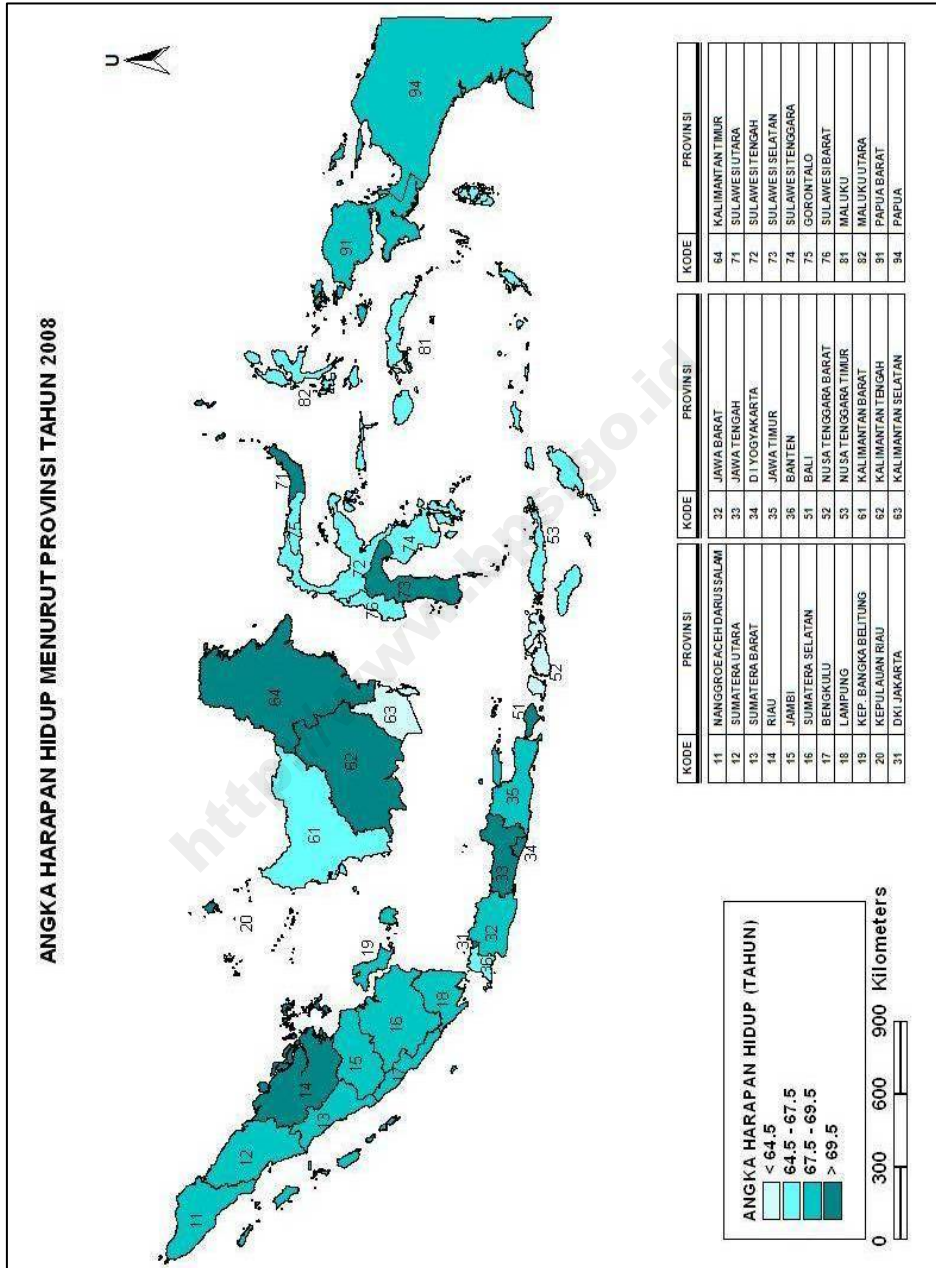
Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
9428	Membramo Raya	64,70	64,86	64,10	64,10	4,32	4,32	591,23	596,11	57,31	57,78	449	469	1,09
9429	Nduga	-	65,36	-	30,52	-	2,78	-	570,21	-	47,45	-	483	-
9430	Lanny Jaya	-	65,95	-	32,65	-	3,10	-	565,35	-	48,12	-	479	-
9431	Mamberamo Tengah	-	66,00	-	32,12	-	2,89	-	565,67	-	47,90	-	481	-
9432	Yalimo	-	65,99	-	32,24	-	2,71	-	565,21	-	47,75	-	482	-
9433	Puncak	-	67,09	-	32,10	-	2,78	-	565,78	-	48,43	-	478	-
9434	Dogiyai	-	66,80	-	32,53	-	3,04	-	566,32	-	48,60	-	477	-
9471	Kota Jayapura	68,16	68,23	98,41	99,09	10,76	10,86	620,00	625,93	73,84	74,56	76	73	2,75
	<b>Indonesia</b>	<b>68,70</b>	<b>69,00</b>	<b>91,87</b>	<b>92,19</b>	<b>7,47</b>	<b>7,52</b>	<b>624,37</b>	<b>628,33</b>	<b>70,59</b>	<b>71,17</b>	-	-	<b>1,98</b>

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2008

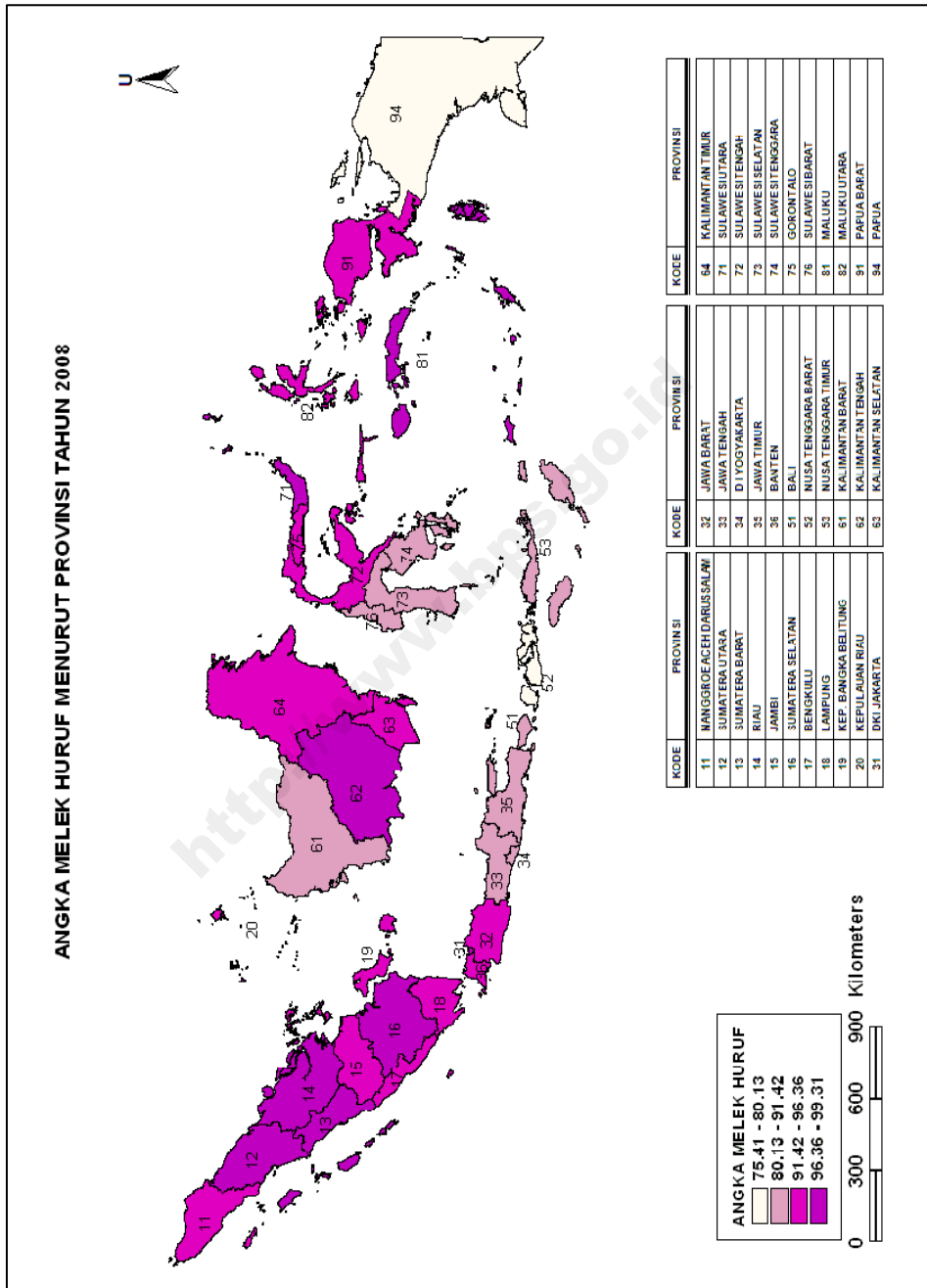


# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 4. Angka Harapn Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008

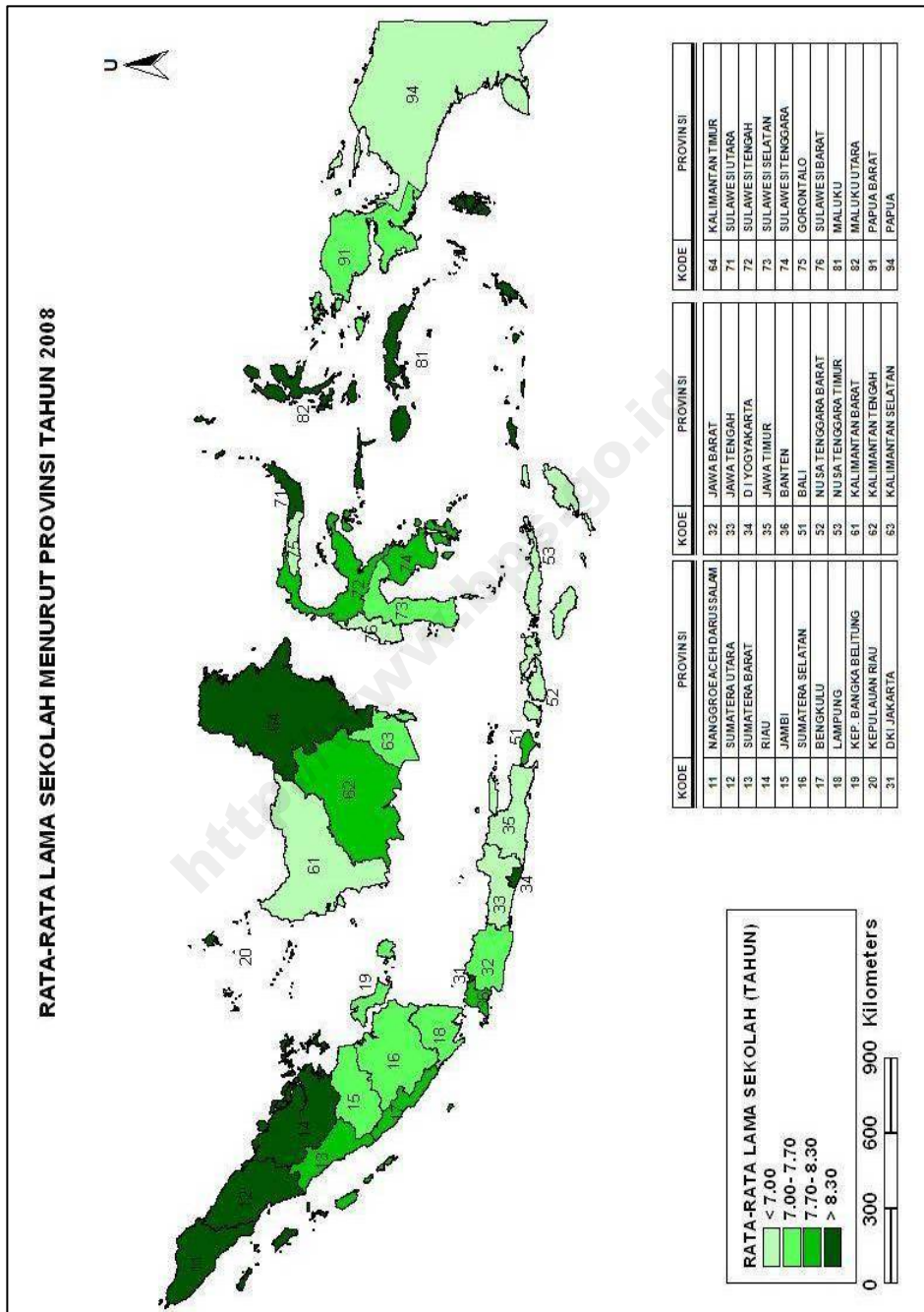


Lampiran 5. Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2008





Lampiran 6. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2008



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 7. Paritas Daya Beli Menurut Provinsi Tahun 2008

